

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DI KEPENGHULUAN HARAPAN
MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Rima Shandawi

NPM : 167110885

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rima Shandawi
NPM : 167110885
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik
di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan
Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 26 November 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,



Lilis Surianti, S.Sos., M.Si

Pembimbing,



Drs. Zulkifli., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rima Shandawi
NPM : 167110885
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik
di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan
Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi ini keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penilaian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu guna memperoleh Sarjana.

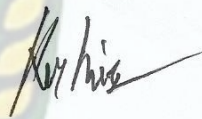
Pekanbaru, 23 Desember 2020

Ketua,



Drs. Zulkifli, M.Si

Sekretaris,



Kartius, S.Sos., M.AP

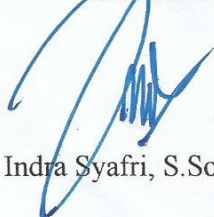
Anggota,



Andri Kurniawan, BPM., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1319/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 22 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 23 desember 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rima Shandawi
NPM : 167110885
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Kepenghuluhan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir
Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Zulkifli, M.Si	Ketua	1.
2.	Kartius, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Anggota	3.
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 23 Desember 2020
An. Dekan,

Indra Safri S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rima Shandawi
N P M : 167110885
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir

Struktur Tim :

1. Drs. Zulkifli, M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Kartius, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rima Shandawi
NPM : 167110885
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik
di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan
Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

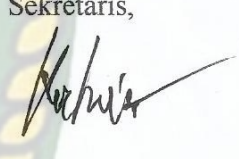
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 Januari 2021

Ketua,

Sekretaris,


Drs. Zulkifli, M.Si


Kartius, S.Sos., M.AP

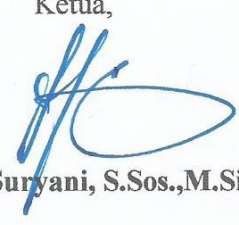
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Administrasi Publik


Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Ketua,


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Shalawat beriring salam penulis kirimkan pada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “allahuma sholli” alla Muhammad wa’alaalihi syayidina Muhammad”, yang telah memberikan suri teladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan juga memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu lembaga pendidikan yang beliau pimpin;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;

3. Ibu Lilis Suriani, S. Sos., M. Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu memberikan saran, petunjuk, dan semangat kepada penulis;
4. Bapak Drs. Zulkifli., M. Si yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi penelitian ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian ini;
6. Kepada Kedua orangtua ananda, Bapak Erwin Chaniago, Ibu Susanti Purba, Kakak Kandung Kiki Shandawi, S.E dan Adik-adik Kandung Rany Friska Shandawi, Febi Angelica Shandawi, Randy Revalindo Shandawi, seluruh Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis hingga selesainya penulisan usulan penelitian ini;
7. Teruntuk sahabat saya 6 Sekawan 4 Sedulur, Yudi Harmes, Andrean, Asep Saputra, Edwardo Saputra, Seli Selfiyana, Eka Fitria Ningsih, Yumna Sari Sinaga, Witrono Putra, dan M. Gemilang yang selalu senantiasa memberikan motivasi, nasehat, saran dalam pembuatan usulan penelitian ini dengan sangat baik, mendukung saya supaya lebih semangat;

8. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik 2016 terutama teman-teman kelas Administrasi Publik C yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan di sisi Allah SWT, Amin.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun teoritis. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini, dapat menambah ilmu secara lebih luas dan mengetahui teori-teori yang belum pernah pembaca ketahui sebelumnya, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Pekanbaru, 26 November 2020

Penulis

Rima Shandawi

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK.	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Administrasi.....	22
2. Konsep Organisasi	23
3. Konsep Manajemen.....	26
4. Konsep Administrasi Pembangunan	28
5. Konsep Partisipasi.....	32
B. Kerangka Pikir	39
C. Hipotesis.....	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variabel.....	44
F. Pengukuran Variabel.....	47

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Tipe Penelitian	52
B.	Lokasi Penelitian	52
C.	Populasi dan Sampel	53
1.	Populasi	53
2.	Sampel	53
D.	Teknik Penarikan Sampel	55
E.	Jenis dan Sumber Data	57
F.	Teknik Pengumpulan Data	58
1.	Observasi	58
2.	Kuisisioner	58
3.	Wawancara	58
4.	Dokumentasi	59
G.	Teknik Analisis Data	59
H.	Jadwal Kegiatan Data	59
BAB. IV.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A.	Sejarah Ringkasan Kepenghuluan Harapan Makmur	61
a.	Sejarah Kepenghuluan	61
b.	Jumlah Penduduk Kepenghuluan Harapan Makmur	64
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	64
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	66
c.	Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur	68
BAB. V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Identitas Responden	80
a.	Jenis Kelamin Responden	80
b.	Umur Responden	83
c.	Tingkat Pendidikan Formal Responden	86
A.	Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur.	90
1.	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	90
2.	Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan	96
3.	Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	105
4.	Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan	109
BAB. VI.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	119
B.	Saran	121
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	122
	Lampiran	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Jumlah Masyarakat yang Hadir Pada Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).....	12
I.2 Target dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	15
I.3 Tabel Fokus Pembangunan Jalan di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	16
I.3 Data Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Infrastruktur, dan Lingkungan Desa.....	17
II.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	44
III.1 Populasi dan Sampel Pemerintahan Desa Harapan Makmur Pada Penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	53
III.2 Populasi dan Sampel Lembaga Kemasyarakatan Desa Harapan Makmur Pada Penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	54
III.3 Populasi dan Sampel Masyarakat Desa Harapan Makmur Pada Penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	55
III.4 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	59
IV.1 Daftar Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur.....	61
IV.2 Batas Wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur.....	62
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kepenghuluan Harapan Makmur	64
IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kepenghuluan Harapan Makmur.....	66
IV.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Kepenghuluan Harapan Makmur.....	67

V.1	Klasifikasi Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
V.2	Klasifikasi Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	82
V.3	Klasifikasi Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	82
V.4	Klasifikasi Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Umur.....	84
V.5	Klasifikasi Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Umur.....	84
V.6	Klasifikasi Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Umur.....	85
V.7	Klasifikasi Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	86
V.8	Klasifikasi Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	87
V.9	Klasifikasi Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	88
V.10	Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan di Kepenghuluan Harapan Makmur.....	91
V.11	Data Sekunder Indikator Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Daftar Hadir Rapat 26 Oktober 2020.....	96
V.12	Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kepenghuluan Harapan Makmur.....	98
V.13	Data Sekunder Indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan, Target dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik 2018.....	103
V.14	Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan di Kepenghuluan Harapan Makmur.....	105
V.15	Data Sekunder Indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Terlaksana Tahun 2018.....	108
V.16	Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan di Kepenghuluan Harapan Makmur.....	110
V.17	Rekapitulasi Tanggapan Responden Partisipasi Masyarakat Mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur	



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur.....	40
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	69
IV.2 Struktur Organisasi BPD Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	70

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Kuisisioner (Untuk Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur) Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	124
2 Daftar Kuisisioner (Untuk Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur) Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	133
3 Daftar Kuisisioner (Untuk Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur) Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	142
4 Daftar Wawancara (Untuk Responden Penghulu, Sekretaris Penghulu, Kaur Perencanaan Kepenghuluan Harapan Makmur) Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	151
5 Rekap Telly Data Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	155
6 Lampiran Dokumentasi Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.....	159
7 SK Dekan Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik No. 228/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa an. Rima Shandawi.....	166
8 Surat Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor No. 5569/E-UIR/27-FS/2020, perihal izin penelitian an. Rima Shandawi.....	167
9 Surat Rekomendasi No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36244 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, perihal izin penelitian an. Rima Shandawi.....	168

- 10 Surat Rekomendasi No. 070/Kesbangpol/2020/264 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kota Bagansiapiapi, perihal izin penelitian an. Rima Shandawi..... 169
- 11 Surat Keterangan No. 100/PEM-HM/X/2020/200 dari Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, tentang pelaksanaan riset dan pengumpulan data an. Rima Shandawi..... 170



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian (UP) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Shandawi
NPM : 167110885
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian (UP) ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 September 2020
Pelaku Pernyataan,



Rima Shandawi.

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
FISIK DI KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Oleh:

Rima Shandawi

167110885

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Kepenghuluan, Masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Kepenghuluan Harapan Makmur, dan untuk mengetahui apa upaya masyarakat dalam mengembangkan pembangunan fisik yang sudah tersedia, serta untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan pemerintahan desa. Dibatasi agar kesadaran publik akan tumbuh untuk berpartisipasi dalam mengembangkan desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena sosial tertentu, dan penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Pada penelitian ini populasi dan sampel yang diambil adalah Pemerintahan Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan, dan Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur. Untuk Pemerintahan Kepenghuluan yaitu menggunakan teknik sampling secara sensus, karena jumlah populasi di kantor Kepenghuluan Harapan Makmur relative sedikit dan mudahnya seluruh responden untuk dijumpai karena berada pada tempat kerja yang sama sehingga memungkinkan untuk di sensus satu per satu dan mengambil informasi sumber data yang ada di kantor Kepenghuluan Harapan Makmur. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat diambil menggunakan teknik proporsional random sampling yaitu, pengambilan sampel secara acak (acak sederhana). Teori dalam penelitian ini adalah menurut Yadav (dalam Mardikanto dan Poerwoko, 2017;82), dengan menetapkan 4 indikator penggolongan dalam partisipasi. Setelah semua data dianalisa dengan metode kuantitatif maka diperoleh hasil penelitian tentang Analisis Partisipasi dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori “Cukup Baik”.

**ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN PHYSICAL
DEVELOPMENT IN HARAPAN MAKMUR VILLAGE, BAGAN
SINEMBAH RAYA DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY**

ABSTRACT

By:

Rima Shandawi

167110885

Keywords: Participation, Development, Village, Society.

This research was conducted in Harapan Makmur Village, Bagan Sinembah Raya District, Rokan Hilir Regency. The purpose of this research is to find out how community participation in Harapan Makmur Village, and to find out what community efforts are in developing the physical development that is already available, and to find out what efforts the village government has made. Made so that public awareness will grow to participate in developing the village. This study uses a quantitative method in the form of descriptive analysis, namely research that intends to take careful and comprehensive measurements of a particular concept or social phenomenon, and this research develops concepts and collects facts. In this study the population and sample taken were the Kepenghuluan Government, Social Institutions, and Community of Harapan Makmur Village. For the Government Village, namely using a census sampling technique, because the population in the Harapan Makmur Village office is relatively small and it is easy for all respondents to be found because they are in the same workplace so that it is possible to census one by one and retrieve information on existing data sources in the office Harapan Makmur Village. Meanwhile, social and community institutions were taken using proportional random sampling technique, namely, random sampling (simple random). The theory in this research is according to Yadav (in Mardikanto and Poerwoko, 2017; 82), by determining 4 indicators of classification in participation. After all data were analyzed using quantitative methods, the results of research on Participation Analysis in Physical Development in Harapan Makmur Village, Bagan Sinembah Raya District, Rokan Hilir Regency, were in the "Good Enough" category.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam istilah Pembangunan, terkandung begitu banyak pokok-pokok pikiran, salah satunya yaitu pembangunan merupakan suatu proses ataupun rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus-menerus mengalami perubahan-perubahan. Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri mengambil keputusan untuk memilih jalan terbaik yang dapat dilaksanakan demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya (dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2017;4).

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam dan seluruh perubahannya.

Pembangunan Desa atau Kepenghuluan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus untuk memperbaiki perekonomian, sosial dan budaya masyarakat didalam kehidupan Negara yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah yang berwenang. Pembangunan fisik merupakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat didaerah. Dalam pembangunan Kepenghuluan, pemerintah berperan memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasi aktif yang berupa gotong royong pada setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yang berbunyi:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingnya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dalam ketentuan Umum Pasal 215 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota mengikutsertakan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan masyarakat desa;
- b. Kewenangan desa;
- c. Kelancaran pelaksanaan investasi;
- d. Kelestarian lingkungan hidup;
- e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Di dalam tahap pelaksanaan Pembangunan Desa dijelaskan pada

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
4. Pembangunan Lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
5. Pelaksanaan Program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Dalam Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 15 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berbunyi:

1. Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.

2. Perlibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan / atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Jadi dapat dikatakan masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan.

Dalam penjelasan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 114 Tahun 2014 Pasal 25 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu:

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat
 - b. Tokoh agama
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh pendidikan
 - e. Perwakilan kelompok tani
 - f. Perwakilan kelompok nelayan
 - g. Perwakilan kelompok perajin
 - h. Perwakilan kelompok perempuan
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua unsur masyarakat bisa ikut serta dalam memusyawarahkan sebuah pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi Kepenghuluan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintahan Kepenghuluan yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepenghuluan dan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPK) dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan menyumbang uang, benda, pikiran (ide) maupun tenaga (gotong royong). Dan untuk pelaksanaan pembangunan pada pedesaan harus sesuai kepada kepentingan masyarakat itu sendiri supaya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa partisipasi masyarakat timbul apabila ada penyesuaian antara kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam hal ini, diharapkan masyarakat tidak sekedar menerima hasil pembangunan, tetapi bagaimana secara langsung pula terlibat pada

perencanaan kegiatan pembanguna yang dimaksud dan senantiasa melakukan pengawasan, sehingga praktek pembangunan dapat dijalankan secara tepat.

Slamet (dalam Suryono 2001;124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikatakan sebagai keikutsertaannya masyarakat dalam melakukan pembangunan, yaitu ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta dalam memanfaatkan, menikmati hasil-hasil dari pembangunan itu sendiri.

Kepenghuluan Harapan Makmur merupakan Kepenghuluan yang mempunyai luas wilayah 633, 25 HA dengan jumlah penduduk sebanyak 1.310 jiwa (hasil sensus desember 2018). Masyarakatnya sangat homogen baik suku, budaya, adat istiadat maupun agama. Mereka terdiri dari masyarakat tempat asli dan masyarakat pendatang.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

Kepala Desa:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina ekonomi desa.
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa:

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Urusan (KAUR) Umum:

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa.
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan (KAUR) Keuangan:

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
 - b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan:

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
 - b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
 - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa.
 - e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK).
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.
4. Surat Keterangan Lalu Lintas.
5. Surat Keterangan NTCR.
6. Surat Pengantar Pernikahan.
7. Surat Keterangan Naik Haji.
8. Surat Keterangan Domisili.
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian.
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati.
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel.
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan.
15. Surat Keterangan Izin Keramaian.

16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu.
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan:

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
 - a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
 - c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Urusan (KAUR) Kesejahteraan Rakyat (KESRA):

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Kepala Dusun:

Tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.

- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD):

1. BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat Kewajiban.
- c. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.

- f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g. Memproses pemilihan kepala desa.
- h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dalam pembangunan desa, semua tidak terlepas dari tugas pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan untuk keberhasilan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat setempat yang ada didesa tersebut sangat dibutuhkan. Maka dari itu pemerintah desa dan masyarakat desa wajib membicarakan atau bermusyawarah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Seperti tabel dibawah ini dimana kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Tabel I.1: Daftar Rapat Hari Rabu 02 Oktober 2019 Partisipasi Masyarakat dalam Menampung Usulan/Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan.

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Drs. H.M Yusuf, M.Si	Sekcam BASIRA	Darussalam
2.	Nanang Krisnanto	Kepala desa	H. Makmur
3.	Nurdianto	Ketua RW 02	H. Makmur
4.	Amri	Kasi Pemerintahan Desa	H. Makmur
5.	Abdul Fatah	Staf BASIRA	Paket K
6.	Masriyana	TPID	Pirdam
7.	Saputra Aditonang	Ketua RW 01	H. Makmur
8.	Wahyu Salih	BP. Kep	H. Makmur
9.	Masriki	TPID	H. Makmur
10.	Sabaruddin	Ketua RT 03	H. Makmur

11.	Agus Regar	Ketua RT 08	H. Makmur
12.	Sakri	Masyarakat	H. Makmur
13.	Saliyan	Masyarakat	H. Makmur
14.	Afriliansyah	Masyarakat	H. Makmur
15.	Suprianto	BP. Kep	H. Makmur
16.	Solehan	Kadus Panca Tunggal I	H. Makmur
17.	Rianto	LPM	H. Makmur
18.	Ariska Sri Rahayu	Staff	H. Makmur
19.	Diana Kumalasari	Kasi Kesejahteraan	H. Makmur
20.	Dewi Ratna Sari	Staff	H. Makmur
21.	Yunita	Staff	H. Makmur
22.	Tuti Sundari	Kaur Umum	H. Makmur
23.	Rismawati	Kasi Pelayanan	H. Makmur
24.	Tyas Arum Diana	Staff	H. Makmur
25.	Sutarto	Masyarakat	H. Makmur
26.	Sukatno	Kadus Panca Tunggal II	H. Makmur

Sumber data: Laporan pertanggungjawaban Kasi Pemerintahan , 2019

Berdasarkan keanekaragaman kondisi masyarakat maka sangat berpengaruh pada bentuk kebersamaan untuk mewujudkan rasa persatuan. Dalam hal ini sangat terlihat melalui pengamatan kegotong royongan masyarakat khususnya dalam pembangunan kepenghuluan yang kini masih terbelang tertinggal dari desa lain karena tingkat partisipasi (keikutsertaan) masyarakatnya masih sangat terbatas atau belum optimal.

Untuk menambah tumbuhnya partisipasi masyarakat, pemerintah telah memberikan berbagai usaha yakni dengan memberikan bantuan berupa ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Hanif Nurcholif, 2011;88). Bantuan ini membantu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong dalam membangun desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan peran kepala desa untuk menentukan suatu keberhasilan dalam pembangunan masyarakat serta mampu menggerakkan masyarakat kearah tujuan yang ingin dicapai.

Di dalam melaksanakan roda pemerintahan desa maka sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dan Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa.

Jadi sangat jelas bahwa tanpa partisipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tidak akan berhasil sebagaimana yang telah diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu faktor penentu akan keberhasilan pembangunan fisik desa dan juga adanya bantuan partisipasi oleh Lembaga Kemasyarakatan seperti BPD, Kepala Desa, Kaur, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lainnya.

Dalam pembangunan kepenghuluan, selain untuk kemajuan kepenghuluan tersebut juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya didaerah tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan data yang ada bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Kepenghuluan Harapan Makmur dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel I.2: Target dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir 2018

No	Jenis Pembangunan Fisik Desa	Volume	Target Biaya (Rp)	Bantuan Pemerintah (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (pos kamling)	2 Unit	43.426.000	30.000.000	13.426.000
2.	Pembangunan Drainase Jl. Sultan Syarif Kasim Kelompok VIII Tahap I	220mx0,5m x0,5m	95.392.500	90.000.000	5.392.500
3.	Pembangunan Drainase Jl. Datuk Pusako Kelompok V Tahap I	230mx0,5m x0,5m	99.745.000	90.000.000	9.745.000
4.	Pembangunan Drainase Jl. Pendidikan Kelompok IV	128mx0,5m x0,5m	56.624.500	50.000.000	6.624.500
	Jumlah		295.188.000	260.000.000	35.188.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kaur Keuangan, 2018

Dapat dilihat dari table diatas, dana/bantuan yang berasal dari pemerintah daerah melalui Dana Desa sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 dan selain itu terdapat juga bantuan atau swadaya masyarakat setempat yang ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu dapat dikatakan

bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa sudah ada, namun belum optimal dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa sumber pembangunan hanya dari pemerintah saja. Dengan demikian hanya sebagian masyarakat saja yang mempunyai kesadaran ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan berupa materi. Selain dari pada itu masyarakat juga beranggapan bahwa pembangunan yang sudah ada hanya tanggungjawab pemerintah saja, hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat setempat tidak hanya dari materi tetapi dalam pemeliharaan pembangunan yang ada.

I.3: Tabel Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Tahun 2019

No.	Jenis Pembangunan	Perkiraan Volume	Manfaat	Dana Yang Di Perlukan
1.	Pemeliharaan Jalan Desa	3,5 KM	Penunjang Kelancaran Pelayanan Masyarakat	200.000.000
2.	Peningkatan Jalan Poros Desa	3,5 KM	Penunjang Kelancaran Pelayanan Masyarakat	200.000.000
3.	Semenisasi Jln Pertanian Dusun I	1250 KM	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	475.000.000
4.	Pembangunan Jln Manggis Dusun I	1125 M	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	105.760.000
5.	Pembangunan Jln Rambutan	1125 M	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	105.300.000

Sumber: Peraturan Penghulu Harapan Makmur Nomor: 03 Tahun 2019

Melihat luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Kepenghuluan Harapan Makmur, secara otomatis membutuhkan bangunan fisik yang cukup banyak untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Berikut Pelaksanaan Pembangunan Desa bidang pembangunan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.

Tabel I.4: Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Infrastruktur, dan Lingkungan Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Jumlah	Sumber Dana
Pembangunan Draenase Jl. Sultan Syarief Kasim Kelompok 5	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes
Pembangunan Draenase Jl. Sultan Syarief Kasim Kelompok 3	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes
Pembangunan Draenase Jl. Sultan Syarief Kasim Kelompok 1	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes
Pembangunan Draenase Jl. Sultan Syarief Kasim Kelompok 6	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes
Pembangunan Draenase Jl. Pendidikan Kelompok 3	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes
Pembangunan Draenase Jl. Wan Muhammad Nur	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes
Pembangunan Draenase Jl. Datuk Pusako	Harapan Makmur	120 m	2019	103.000.000	APBDes

Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Jumlah	Sumber Dana
Boks Culvert Jl. Sultan Syarif Kasim	Harapan Makmur	2 Unit	2019	35.000.000	APBDes
Boks Culvert Jl. Datuk Pusako	Harapan Makmur	2 Unit	2019	35.000.000	APBDes
Paving Block Halaman TK	Harapan Makmur	4m x 10m	2019	15.000.000	APBDes
Renovasi Ruang Belajar PAUD	Harapan Makmur	6 x 6 m	2019	30.000.000	APBDes
Pos Kamling RT. 003 RW. 002 Dusun Panca Tunggal I	Harapan Makmur	1 Unit	2019	45.000.000	APBDes
Pos Kamling RT. 001 RW. 002 Dusun Panca Tunggal II	Harapan Makmur	1 Unit	2019	45.000.000	APBDes

Sumber: Laporan pertanggungjawaban Kaur Keuangan, 2019

Dari table diatas, tampak bahwa banyaknya pembangunan yang harus dibangun di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mencapai pembangunan tersebut tentu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat setempat guna untuk mempercepat pelaksanaan, dan tidak hanya mengandalkan atau menunggu dana dari pemerintah. Tetapi disamping itu, partisipasi masyarakat juga membutuhkan dukungan dari Kepala Desa. Arahan serta bantuan dana juga dapat mempercepat pembangunan fisik desa didesa tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut adalah masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum dapat

dilaksanakan karena kurangnya biaya dan akan diprioritaskan kembali pada RKP tahun mendatang.

Dengan keterangan yang diambil dari data yang ada diatas, penulis menemukan beberapa fenomena antara lain:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat yang bersifat gotong royong ataupun bantuan berupa materi untuk meringankan biaya pembangunan, masyarakat terkesan masa bodoh, tidak menunjukkan kepeduliannya untuk ikut serta hanya dalam hitungan kecil.
2. Belum terlaksananya peningkatan pembangunan jalan (pengaspalan jalan) serta pembangunan Drainase di beberapa jalur di Desa tersebut.
3. Masyarakat masih kurang peduli terhadap pembangunan yang ada, masyarakat hanya mau menggunakannya saja tetapi tidak untuk memeliharanya dan merawatnya dengan baik, serta masih kurangnya pengembangan dalam pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian pendahuluan dan permasalahan yang ada diatas tersebut maka penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa tersebut dengan judul: “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir”.

Keberhasilan pembangunan desa selain tergantung kepada kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya yang baik, juga ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan terutama di wilayah pedesaan seperti Kepenghuluan Harapan Makmur ini bermaksud untuk mewujudkan perubahan-perubahan keadaan desa secara sadar dan terencana yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

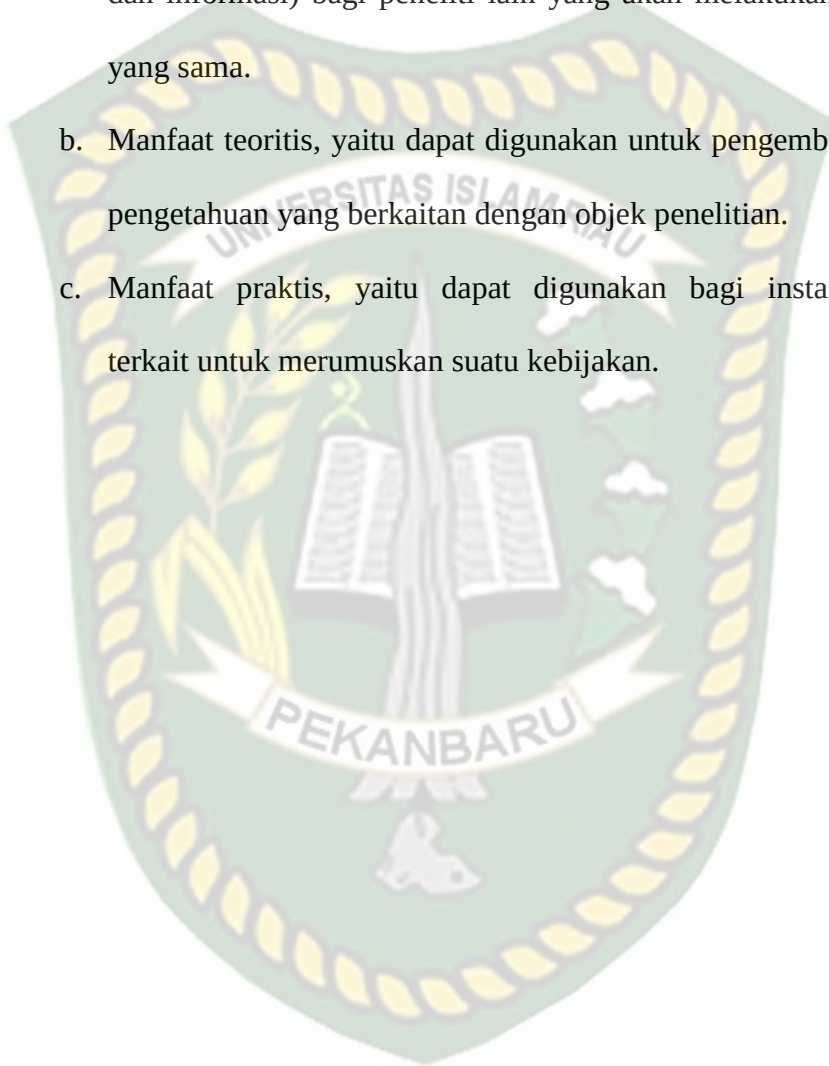
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kepenghuluan Harapan Makmur.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kepenghuluan Harapan Makmur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat akademik, yaitu sebagai data sekunder (berupa data-data dan informasi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Manfaat praktis, yaitu dapat digunakan bagi instansi-instansi terkait untuk merumuskan suatu kebijakan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Menurut Zulkifli dan Moris A. Yogia (2014;9) Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu Sosial, defenisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Syafri (2012;4) Administrasi merupakan salah satu spesialisasi ilmu sosial yang mempelajari tentang kerja sama manusia dalam mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan atau pekerjaan tulis menulis, sedangkan administrasi secara luas adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Affifuddin 2010;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan E. N. Gladden (dalam Syafri 2012;9) mendefenisikan administrasi sebagai aktivitas manusia yang bersifat umum yang dilaksanakan, baik didalam maupun diluar lingkungan public, didalam masyarakat mana pun.

Atmosudirdjo (2001;21) berpendapat bahwa administrasi sebagai fungsi atau kegiatan adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya. Organisasi modern sebagai badan adalah organisasi yang mempunyai konstitusi tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud, dan tujuan-tujuannya, usahanya, sumber pendanaannya serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Dari pengertian konsep administrasi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia senantiasa berusaha mencari cara yang paling efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan kerjasama sekelompok orang (dua orang atau lebih) yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Organisasi secara umum didefenisikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri secara sadar

dengan satu tujuan bersama untuk hubungan kerja yang rasional. Organisasi bisa terjadi dimana saja, dikarenakan organisasi tidak hanya bersifat formal, melainkan dapat bersifat non formal.

Zulkifli (2005;73) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerja sama, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya Zulkifli (2005;131) juga mengemukakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan eksternal.

Sedangkan menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2005;26) menyatakan organisasi merupakan struktur hubungan antar pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu administrasi.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Kartono, 2008:7) organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Rivai (2008;188) mengatakan bahwa organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Begitu juga dengan pendapat dari Kartono (2008;8) bahwa organisasi disebutkan sebagai sekumpulan orang yang tunduk pada konvensi bersama untuk mengadakan kerjasama dan interaksi guna mencapai tujuan bersama dalam rangka keterbatasan sumber daya manusia dan sumber materil.

Sufian (2003;13) berpendapat bahwa organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktifitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

James D. Mooney (dalam Manullang 2006;59) mengatakan “organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”, sedangkan pendapat lain dari Chester I. Barnard memberikan pengertian yaitu organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi itu dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu.
- b. Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan, kerja sama dari

orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi sebagai alat atau wadah dari seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu.

3. Konsep Manajemen

Manajemen sebagai proses dalam menggerakkan organisasi tidak akan ada artinya tanpa adanya pimpinan dengan tugas kepemimpinannya. Manajemen dan kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat, dikarenakan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen yang berfungsi sebagai motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia di suatu organisasi.

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh karena itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menyertakan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

George R. Terry (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;18) mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Johan F (dalam Zulkifli, 2005; 16) Manajemen berpendapat bahwa manajemen merupakan seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, dan demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik untuk pimpinan maupun para pekerja sekaligus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) berpendapat manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Pendapat lain yaitu The Liang Gie mengemukakan bahwa manajemen suatu konsep tata pimpinan yaitu rangkaian kegiatan penataan yang merupakan penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Dari beberapa pengertian mengenai manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan akumulatif kemampuan dan keterampilan mengembangkan pendekatan dan strategi untuk membangun semangat kerja dengan cara memberikan motivasi agar para personil senang akan kerjasama sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan semula dapat tercapai.

4. Konsep Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2009;5) Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di Negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuannya.

Tujuan utama dilakukannya pembangunan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan nyaman.

Menurut Sondang P. Siagian (2018;4) Pembangunan Biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Maka dari definisi diatas muncul tujuh ide pokok:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, yang berarti pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Maksud dari modernitas disini adalah sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi tetap fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi-dimensional, artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat masuk kedalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah dijelaskan diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga Negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya serta semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Negara bangsa lain tersebut.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Menurut Kuncoro (2010;20) Pembangunan Fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Misalnya, pembangunan infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contohnya adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Saul M. Katz (2010:34) mendefinisikan bahwa pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung

secara luas dalam masyarakat dan bukan pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya.

Menurut Sondang P. Siagian (2010;35) mengemukakan arti pembangunan yaitu:

- a. Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sufian (2003;35) mengatakan ada dua kelompok perilaku dalam pembangunan, yaitu: pemerintah dan masyarakat. Kedua perilaku pembangunan ini adalah sama-sama penting dalam memberikan akses bagi pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik dan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan berkeadilan sosial.

Siagian (2009;5) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuannya.

Menurut Riggs (dalam Ariffuddin, 2010;52) mengatakan bahwa Administrasi Pembangunan menunjukkan pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

Montgomery dan Esmam (dalam Ariffuddin, 2010;52) mengemukakan Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerinttahan dan juga berarti perbaikan aparatur dan pelaksanaan usaha pembangunan.

Selanjutnya menurut Siagian (dalam Ariffuddin, 2010;52) Administrasi Pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan Negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

5. Konsep Partisipasi

Banyaknya konsep yang dikemukakan oleh para ahli tentang partisipasi. Namun secara keseluruhan partisipasi diartikan sebagai turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan, peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Secara umum partisipasi dapat diartikan yaitu keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan.

Menurut Julianara (2003:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, sedangkan partisipasi masyarakat menurut pendapat Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Marbun (2003;198) partisipasi adalah tingkat rasa keterlibatan dan keikutsertaan seseorang berkat sumbangan pikiran dan usulnya sehingga mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan ikut berusaha mencapai sasaran suatu tujuan organisasi.

Mardikanto dan Poerwoko (2017;82) dalam bukunya mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Cleaver (dalam Bayoa, 2010;9) mengatakan bahwa partisipasi merupakan sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka.

Selanjutnya Siagian (2004;6) berpendapat bahwa partisipasi adalah bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan

terhambatnya suatu kejadian pembangunan, sedangkan partisipasi aktif dapat berwujud:

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga sosial dan politik yang dimasyarakatkan sebagai penyaluran aspirasinya.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain seperti kepada pimpinan tokoh masyarakat yang ada baik yang sifatnya formal maupun informal.
- c. Menurut kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban yang lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan penting.

Simatupang (2004;41) mengemukakan pendekatan mengenai partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang dilakukan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti juga sebagai kerja sama untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam Negara pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya dan terwujudnya masa depan yang baru.
- c. Partisipasi tidak hanya mengambil bagian dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan tetapi juga berarti memberikan sumbangan pengertian kita mengenai pembangunan itu, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dan martabat, keadilan sosial dan memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi-generasi yang akan datang.

Mengacu kepada pengertian diatas maka partisipasi menurut pendapat Simatupang (2004;37) membuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk menyumbangkan konstribusi demi terbinanya dan terwujudkan masa depan yang baik.

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Dalam hal ini, masyarakat adalah tokoh utama yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006) mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan

menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan;

3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial;
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan diri sendiri;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Selanjutnya menurut pendapat Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001;201-202) menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa. Echols dan Shadily (dalam Soetrisno, 2000;419) bahwa partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan organisasi.

Yadav (dalam Mardikanto dan Poerwoko, 2017;82) menggolongkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan kedalam empat golongan yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) pada umumnya selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang lebih banyak mementingkan kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang dalam mencerminkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam suatu rencana pembangunan untuk membuka forum secara langsung bagi

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi ini bukan hanya bertujuan agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik mengenai masalah-masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Untuk itu partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan sekaligus perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Partisipasi ini merupakan unsur yang paling penting dan sering dilupakan oleh masyarakat. Padahal tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu masyarakat banyak. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan dapat merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi menurut Sastropoetro (dalam Isbandi, 2007:16) adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan masyarakat yang diberikan untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan program pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau

program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Davis (2000;142) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung jawabkan keterlibatannya.

Slamet (dalam Suryono 2001:124) mengartikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, ikut dalam memanfaatkan dan ikut serta memanfaatkan sekaligus menikmati hasil-hasil dari pembangunan itu sendiri.

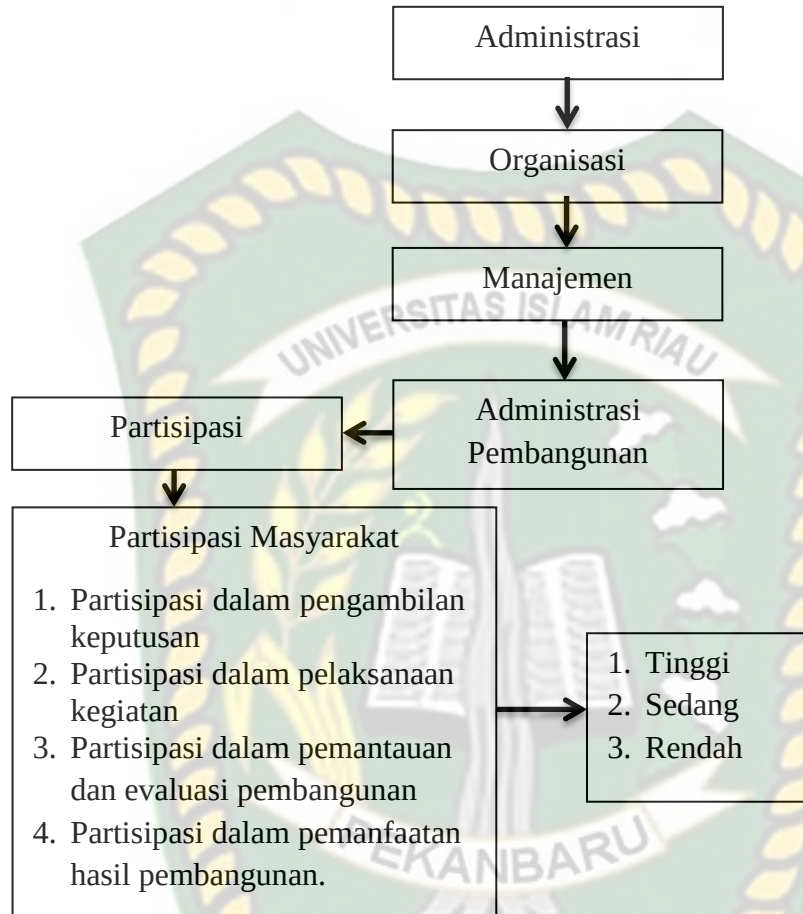
Dilihat dari sisi lain yang perlu diingat bahwa masyarakat lebih mengetahui tentang kondisi lingkungannya, mana yang harus dilakukan pembangunannya dan mana yang tidak perlu dilakukan pembangunannya. Dalam system demokrasi masyarakat mempunyai hak suara untuk menerima dan menolak berbagai bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terkait diharapkan untuk jeli dan tidak terkesan memaksakan kehendak sendiri untuk melakukan kegiatan tanpa memandang aspirasi masyarakat. Tetapi kebijakan yang dapat menyalurkan keinginan masyarakat juga harus sesuai prosedur dengan senantiasa berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga hasil dari sebuah pembangunan tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.

Menurut Bornby dalam Theresia (2014;196) partisipasi adalah tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan menurut pendapat Adisasmita (2006;34) mengatakan bahwa partisipasi yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Dan sejalan yang dikatakan oleh Chandra (2003;5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunis.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir merupakan alur pikir penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator yang relevan yang digunakan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Adapaun kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

“Diduga Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik”.

D. Konsep Operasional

Penulis berharap penelitian ini jelas, benar dan terukur. Untuk itu diperlukan batasan-batasan dan konsep-konsep yang telah dioperasionalkan berkaitan dengan variable-variabel penelitian. Adapun konsep dan batasan-batasan yang telah dioperasionalkan berkaitan dengan variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sangat dibutuhkan teori administrasi karena sesuai dengan variabel yaitu partisipasi dimana partisipasi membutuhkan kerjasama masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun desa lebih baik lagi.
- b. Organisasi, dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi yaitu salah satu tempat yang berperan sangat penting untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
- c. Manajemen adalah suatu cara untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.
- d. Manajemen Pembangunan, dalam penelitian ini yaitu suatu sistem untuk mengelola data dan informasi pendukung kebijakan dalam pembangunan, sistem perencanaan, sekaligus penganggarannya,

sistem pengorganisasian, pelaksanaan pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan serta sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan.

- e. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.
- f. Pemerintah Desa merupakan simbol formal kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa, mewakili masyarakat desa.
- g. Penghulu yaitu kepala kepenghuluan atau perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kepenghuluan di Desa Harapan Makmur.
- h. Kepala desa merupakan penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa.
- i. Rukun Warga (RW) yaitu istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan. RW merupakan Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
- j. Rukun Tetangga (RT) yaitu pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. RT bukan termasuk pembagian administrasi

pemerintahan, melainkan pembentukannya melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.

- k. Desa adalah suatu wilayah tempat tinggal sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.
- l. Pembangunan adalah suatu proses dengan rangkaian usaha sesuai dengan yang telah direncanakan dengan tujuan menuju perubahan yang lebih baik lagi, dan dilakukan dengan secara sadar oleh masyarakat dan pemerintah Kepenghuluan Harapan Makmur.
- m. Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan fisik yang berupa sarana dan prasarana pedesaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur.
- n. Partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur.
- o. Pembangunan fisik adalah penyelenggaraan kegiatan yang berupa infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat desa dengan tujuan melaksanakan pembangunan yang lebih baik

dari sebelumnya. Pembangunan Fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum.

- p. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah dan saling berinteraksi satu sama lain.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik.	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	a. Menghadiri rapat Kepenghuluan b. Partisipasi masyarakat dalam bergotong royong mempercepat proses pembangunan c. Mengeluarkan ide-ide dalam pembangunan. d. Bantuan dana dari masyarakat sangat dibutuhkan atau cukup dengan bantuan dana dari pemerintah.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2017:82)		2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.	a. Ikut serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. b. Partisipasi masyarakat dalam bergotong royong mempercepat proses pembangunan c. Membantu dengan bantuan materi berupa dana atau bentuk material untuk melancarkan pembangunan desa. d. Bantuan dana dari masyarakat sangat dibutuhkan atau cukup dengan bantuan dana dari pemerintah	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Partisipasi dalam	a. Membantu dalam	

		pemantauan dan evaluasi pembangunan.	melihat perkembangan pembangunan dan memberi masukan. b. Respon dari masukan yang berasal dari masyarakat c. Keterlibatan dalam menanggapi sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat setempat. d. Kepuasan masyarakat dalam merespon pembangunan yang telah ada, sesuai tidaknya dengan apa yang diharapkan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan	a. Menikmati hasil dari pembangunan yang ada. b. Manfaat hasil pembangunan bagi masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik

			c. Merawat hasil pembangunan. d. Kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.	
--	--	--	---	--

F. Teknik Pengukuran

Penelitian terhadap setiap indikator ini menggunakan skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2016;107). Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 katagori yaitu Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Masing-masing pertanyaan di berikan 4 katagori alternative jawaban tersebut, dan setiap di beri bobot skor sebagai berikut:

- a. Baik dengan bobot skor : 3
- b. Cukup Baik dengan bobot skor : 2
- c. Kurang Baik dengan bobot skor : 1

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total skor nilai tertinggi} - \text{total skor terendah} - 1}{\text{Jumlah kategori}}$$

Dimana :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi (3)} \times \text{Jumlah Pertanyaan (4)} \times \text{Jumlah Responden (106)} = 1.272$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Katagori Terendah (1)} \times \text{Jumlah Pertanyaan (4)} \times \text{Jumlah Responden (106)} = 424$$

$$\text{Interval} = \frac{1.272 - 424 - 1}{4} = 211$$

Berdasarkan rumus diatas, untuk Pengukuran Variabel Partisipasi Masyarakat adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dalam tiap Indikator atau 16 Pertanyaan pada seluruh Indikator untuk 106 responden dengan skor tertinggi 1.272 dan skor terendanya 424 dengan kelas interval 211 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 1.061-1.272

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 849-1.060

Kurang Baik :Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 637-848

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan rumus diatas, untuk Pengukuran Indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dalam tiap Indikator atau 16 Pertanyaan pada seluruh Indikator untuk 106 responden dengan skor tertinggi 1.272 dan skor terendanya 424 dengan kelas interval 211 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 1.061-1.272
Cukup Baik	: Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 849-1.060
Kurang Baik	:Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 637-848.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rumus diatas, untuk Pengukuran Indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dalam tiap Indikator atau 16 Pertanyaan pada seluruh Indikator untuk 106 responden dengan skor tertinggi 1.272 dan skor terendanya 424 dengan kelas interval 211 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 1.061-1.272

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 849-1.060

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 637-848

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Berdasarkan rumus diatas, untuk Pengukuran Indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dalam tiap Indikator atau 16 Pertanyaan pada seluruh Indikator untuk 106 responden dengan skor tertinggi 1.272 dan skor terendanya 424 dengan kelas interval 211 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 1.061-1.272

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 849-1.060

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 637-848

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Berdasarkan rumus diatas, untuk Pengukuran Indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dalam tiap Indikator atau 16 Pertanyaan pada seluruh Indikator untuk 106 responden dengan skor tertinggi 1.272 dan skor terendanya 424 dengan kelas interval 211 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 1.061-1.272

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 849-1.060

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Tahun 2020, 637-848

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Guna memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang data dikumpulkan dari sampel dan populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey secara kompleks adalah penelitian yang mengambil populasi dan sampel menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 2008;3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Adapun penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan seperti gotong royong dalam proses pembangunan yang belum optimal untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur yang mengakibatkan kurangnya perkembangan bangunan yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu peneliti begitu tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Komaruddin (dalam Mardalis, 2010:53) populasi semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi ini adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan Pemerintahan di Kepenghuluan Harapan Makmur tersebut.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari objek yang diteliti atau bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi terlalu besar peneliti tidak dapat mempelajari keseluruhan populasi, karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka hal ini peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi (dalam Sugiono, 2010:81).

Tabel III.1: Keadaan Populasi dan Sampel Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Pada Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase(%)
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris	1	1	100%
3.	Kaur	3	3	100%
4.	Kasi	3	3	100%

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase(%)
6.	BPD	5	5	100%
	Jumlah	15	15	100%

Sumber: Sekretaris Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.2: Keadaan Populasi dan Sampel Lembaga Kemasyarakatan Desa Harapan Makmur Pada Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Ketua RW	4	1	25%
2.	Ketua RT	12	3	25%
3.	Pemuka Masyarakat	6	2	25%
4.	LPM	3	1	25%
5.	BUMKEP	4	1	25%
6.	BKM	3	1	25%
7.	Karang Taruna	23	6	25%
8.	PKK	38	9	25%
	Jumlah	93	24	

Sumber: Sekretaris Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir

Tabel III.3: Keadaan Populasi dan Sampel Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Pada Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

No	Wilayah	Masyarakat	Populasi (KK)	Sampel (KK)	Presentase (%)
1.	Dusun Panca Tunggal I	RW I RT I	24	5	20%
		RW I RT II	28	6	20%
		RW I RT III	20	4	20%
		RW II RT I	34	7	20%
		RW II RT II	33	7	20%
		RW II RT III	36	7	20%
2.	Dusun Panca Tunggal II	RW I RT I	25	5	20%
		RW I RT II	33	7	20%
		RW I RT III	25	5	20%
		RW II RT I	25	5	20%
		RW II RT II	26	5	20%
		RW II RT III	36	7	20%
	Jumlah		345	70	

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Institusi Pemerintahan di Kepenghuluan Harapan Makmur termasuk Lembaga Kemasyarakatan dan seluruh komponen masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Institusi Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur dan Lembaga Kemasyarakatan dalam penelitian ini menarik sampel, penulis menggunakan teknik sampling secara sensus, karena jumlah populasi di kantor

Kepenghuluan Harapan Makmur relative sedikit dan mudahnya seluruh responden untuk dijumpai karena berada pada tempat kerja yang sama sehingga memungkinkan untuk di sensus satu per satu dan mengambil informasi sumber data yang ada di kantor Kepenghuluan Harapan Makmur 2020.

Sedangkan masyarakat diambil menggunakan teknik proporsional random sampling yaitu, pengambilan sampel secara acak (acak sederhana) jumlah sampel yang diambil adalah 70 Kepala Keluarga (KK) dari 345 Kepala Keluarga (KK) populasi untuk mewakili dari seluruh jumlah masyarakat berdasarkan Kepala Keluarga (KK).

Dalam pengambilan sampel pada masyarakat dikepenghuluan Harapan Makmur, terdiri dari 2 (Dua) Dusun yang mana tiap dusun mempunyai 2 (Dua) RW dan 6 (Enam) RT pada masing-masing RT terdiri dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berbeda-beda.

Untuk Dusun I RW I RT I, jumlah populasi 24 KK dan sampel 5 KK. Untuk Dusun I RW I RT II, jumlah populasi Kepala Keluarga (KK) sebanyak 28 KK, tetapi yang dijadikan sampel hanya berjumlah 6 KK. Untuk Dusun I RW I RT III, jumlah populasi Kepala Keluarga (KK) berjumlah 20 KK, yang dijadikan sampel berjumlah 4 KK. Sedangkan untuk Dusun I RW II RT I, jumlah populasi Kepala Keluarga (KK) sebanyak 34 KK, namun yang dijadikan sampel hanya 7 KK. Untuk Dusun I RW II RT II populasinya adalah

33 KK dan yang dijadikan sampel sebanyak 7 KK, Dusun I RW II RT III jumlah populasi 36 KK, sampel yang diambil 7 KK.

Selanjutnya untuk Dusun II RW I RT I terdapat populasi 25 KK, dan yang dijadikan sampel sebanyak 5KK, pada Dusun II RW I RT II populasinya adalah 33 KK, dan sampelnya sebanyak 7 KK. Dusun II RW I RT III mempunyai populasi sebanyak 25, maka sampel yang diambil sebanyak 5 KK. Sama halnya pada Dusun II RW II RT I populasi 25 KK dan sampel 5 KK, Dusun II RW II RT II ada 26 KK dan sampel 5 KK, terakhir pada Dusun II RW II RT III mempunyai 36 KK dan sampel yang diambil sebanyak 7 KK.

Jadi jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang berada di Kepenghuluan Harapan Makmur adalah 345 KK. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menurut pengamatan penulis, dari sejumlah sampel tersebut sudah dapat mewakili masyarakat secara keseluruhan.

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yaitu: identitas responden, dan pendapat langsung tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang telah diolah baik dalam bentuk literatur, yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti monografi

Kepenghuluan, struktur Kepenghuluan dan Pemerintah Kepenghuluan yang diperoleh dari Kepenghuluan Harapan Makmur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu studi lapangan dengan keterkaitan data yang dilakukan penelitian secara langsung pada focus penelitian. Tanpa mengetahui teknik penulisan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standard data yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yakni penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
- c. Wawancara adalah sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka dalam buku (Bagong & Sutinah, 2012;69) pengumpulan data secara langsung dengan menyiapkan berbagai pertanyaan menyangkut permasalahan yang dihadapi peneliti.

- d. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data yang penting, baik itu berbentuk teoritis, maupun data konkrit yang terdapat dilapangan. Dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian penulis terkumpul, maka data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan penelitian penulis ini. Selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan menganalisa data tersebut, lalu menarik kesimpulan, serta akhirnya memberikan saran-saran.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.4 : Jadwal Waktu Kegiatan-Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																			
		Desember 2019				Januari – Februari-Maret 2020				April-Mei-Juni 2020				Juli-Agustus-September 2020				Oktober-November 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X				X	X	X	X	X	X	X	X								
2	Seminar UP														X						
3	Revisi UP															X					

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																			
		Desember 2019				Januari – Februari-Maret 2020				April-Mei-Juni 2020				Juli-Agustus-September 2020				Oktober-November-Desember 2020-januari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Revisi Kuisisioner																X				
5	Rekomendasi Survey																X				
6	Lapangan Survey																X				
7	Analisis Data																X				
8	Penyusunan dan Hasil Laporan																X				
9	Konsultasi Revisi Skripsi														X	X	X				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																			X	
11	Revisi Skripsi																	X	X		
12	Penggandaan Skripsi																				X

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kepenghuluan Harapan Makmur

a). Sejarah Kepenghuluan

Pembangunan Kepenghuluan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan masyarakat Kepenghuluan dalam usaha merubah tatanan kehidupan dan kondisi Kepenghuluan disegala aspek dengan tujuan kearah yang lebih baik dan dinamis.

Kepenghuluan Harapan Makmur merupakan sebuah Kepenghuluan Induk dari pemekaran Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 dengan Perda kabupaten Rohil Tahun 2014, berubah sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun kepemimpinan yang pernah menjabat dan memimpin Kepenghuluan ini sampai sekarang yaitu:

Tabel IV.1 : Daftar Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur.

No	Pejabat Penghulu Ke	Nama	Periode
1	HARAPAN MAKMUR	YUSMANTO	2013 S/D 2016
2	HARAPAN MAKMUR	SUPIAN	2016 S/D 2017
3	HARAPAN MAKMUR	NANANG KRISNANTO	2018 S/D 2023

Sumber: RPJM Kepenghuluan Harapan Makmur 2018-2023

Sebelum dimekarkan Kepenghuluan Harapan Makmur terbagi dalam 1 Dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). Dan setelah dimekarkan menjadi 2 Dusun, yaitu Panca Tunggal I dan Dusun Panca Tunggal II, 4 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT). Dilakukannya pemekaran wilayah tersebut bertujuan untuk mempermudah kinerja Satuan Kerja Perangkat Kepenghuluan dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar lebih efektif dan efisien.

Secara umum kondisi dan geografis Kepenghuluan Harapan Makmur memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai. Kepenghuluan Harapan Makmur memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Kepenghuluan Harapan Makmur memiliki luas wilayah 633,25 Ha dan didominasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 563 Ha, Pemukiman 66.25 Ha, Lapangan 4 Ha. Berikut adalah batas wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur:

Tabel IV.2 : Batas Wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur 2018

No.	Wilayah	Luas
1.	Pemukiman	80,4 Ha
2.	Pertanian/Perkebunan	400 Ha
3.	Ladang/Tegalan	150 Ha
4.	Hutan	-
5.	Rawa-rawa	-
6.	Perkantoran	0,35 Ha
7.	Sekolah	2 Ha
8.	Jalan	13,700 KM
9.	Lapangan Sepak Bola	0,5 Ha

Sumber: RPJM Kepenghuluan Harapan Makmur 2018-2023

Mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi Kepenghuluan yang memadai, bukan berarti menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat, jikalau masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya, maka untuk memanfaatkan potensi alam yang memadai ini perlu dengan ilmu pengetahuan dan modal yang tinggi. Masalah inilah yang merupakan problem hampir semua Kepenghuluan yang ada di Indonesia.

Dengan jumlah Penduduk sebanyak 1.307 jiwa, Kepenghuluan Harapan Makmur telah memiliki berbagai fasilitas, baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya. Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi Kepenghuluan Harapan Makmur perlu melakukan peningkatan pembangunan disegala aspek.

Kepenghuluan Harapan Makmur merupakan salah satu dari 12 Kepenghuluan di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Jarak yang dapat ditempuh dari Bandara Sultan Syarif Kasyim II ke Kepenghuluan Harapan Makmur 350 km/7 Jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), sedangkan jarak tempuh dari Kota Bagan Siapi-api (Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir) ke Kepenghuluan Harapan Makmur adalah 175 km/3 Jam.

Kepenghuluan Harapan Makmur terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dengan jarak 5 KM, yang memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Kepenghuluan Salak
- Sebelah Selatan dengan : Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan
- Sebelah Timur dengan : Perkebunan Plasma

- Sebelah Barat dengan : Kelurahan Bagan Sinembah Kota

Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur sebagian besar merupakan kawasan dataran , disamping juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan rendah sangat cocok untuk tanaman keras yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Rambutan dan tanaman palawija lainnya.

b). Jumlah Penduduk Kepenghuluan Harapan Makmur

Penduduk adalah faktor utama yang dapat melakukan pergerakan dalam kegiatan pembangunan disebuah Desa/Kepenghuluan. Karena selain menjadi subjek dalam kegiatan pembangunan, masyarakat merupakan objek dari pembangunan yang ada di Desa/Kepenghuluan sehingga keadaan dan jumlah dari masyarakat/penduduk penting untuk diketahui jumlah dan keberadaannya. Adapun keadaan penduduk di Kepenghuluan Harapan Makmur sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Peneliti mengacu pada Laporan Penduduk Desember 2019 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 345 Kepala Keluarga (KK):

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	658 orang	59%
2.	Perempuan	649 orang	41%
	Jumlah	1307 orang	100%

Sumber: RPJM Kepenghuluan Harapan Makmur 2018-2023

Dapat dilihat dari table diatas bahwa jumlah penduduk Kepenghuluan Harapan Makmur antara Laki-Laki dan Perempuan Hampir mempunyai jumlah yang sama. Jumlah yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 658 Jiwa atau 59%, dan jumlah yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 657 Jiwa atau 41%. Dari jumlah diatas tersebut diperoleh dari 345 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur merupakan penduduk yang berasal dari keturunan :

- Suku Jawa, merupakan masyarakat asli transmigrasi yang menyebar diseluruh dusun-dusun yang ada di Kepenghuluan Harapan Makmur yang hidup sebagai pekebun Kelapa Sawit..
- Suku Batak, Suku Minang dan Suku Melayu merupakan masyarakat pendatang yang hampir menyebar disetiap dusun – dusun yang ada di Kepenghuluan Harapan Makmur.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki masyarakat. Selain pengetahuan dari keluarga, masyarakat tentu harus mempunyai pengetahuan yang berasal dari pendidikan yang mereka tempuh. Dalam memiliki banyak ilmu pengetahuan, dapat menentukan upaya dalam pencapaian tujuan dan juga masyarakat lebih dapat membantu dalam perkembangan di Kepenghuluan Harapan Makmur. Adapun Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kepenghuluan Harapan Makmur, dapat dilihat dari table berikut:

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD/MI	192 orang	49 %
2.	SLTP/MTs/SMP	99 orang	25 %
3.	SLTA/MA/SMA	71 orang	18 %
4.	SI/DIPLOMA	23 orang	6 %
5.	Putus Sekolah	5 orang	2 %
	Jumlah	390 orang	100%

Sumber: RPJM Kepenghuluan Harapan Makmur 2018-2023

Dapat dilihat dari table diatas yaitu terlihat bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang lebih dominan adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu berjumlah 192 orang. Sedangkan tingkat pendidikan lainnya mempunyai jumlah dibawah dari jumlah tingkat pendidikan SD. Keadaan ini sangat memprihatinkan bila dikaitkan dengan sumber daya manusia yang ada di Kepenghuluan Harapan Makmur, karena untuk memajukan suatu daerah harus dipenuhi dengan generasi-generasi yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki wawasan luas serta generasi-generasi yang cerdas.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian di Kepenghuluan Harapan Makmur ini jika dilihat sama seperti di daerah lain yaitu Petani, Pedagang, PNS, Tukang, Guru, Bidan/Perawat, TNI/POLRI, Pensiunan, Buruh Swasta, dll. Hanya saja dikarenakan Kepenghuluan Harapan Makmur merupakan daerah Perkebunan, jadi masyarakat lebih banyak menjadi Petani.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel IV. 5: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di
Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan
Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Petani	102 orang	41 %
2.	Pedagang	9 orang	5 %
3.	PNS	3 orang	2 %
4.	Tukang	4 orang	2 %
5.	Guru	7 orang	4 %
6.	Bidan/Perawat	2 orang	1 %
7.	TNI/POLRI	3 orang	2 %
8.	Pensiunan	5 orang	3 %
9.	Buruh	60 orang	24 %
10.	Swasta	25 orang	13 %
11.	Lain-Lain	5 orang	3 %
	Jumlah	225 orang	100 %

Sumber: RPJM Kepenghuluan Harapan Makmur 2018-2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai Petani sebanyak 102 orang , pedagang sebanyak 9 orang, PNS sebanyak 3 orang, Tukang sebanyak 4 orang, Guru sebanyak 7 orang, Bidan/Perawat sebanyak 2 orang, TNI/POLRI sebanyak 3 orang, Pensiunan sebanyak 5 orang, Buruh sebanyak 60 orang, Swasta sebanyak 25 orang, dan lain-lain sebanyak 5 orang.

Dapat dilihat bahwa rendahnya pendidikan menyebabkan banyak penduduk yang hanya mampu menggantungkan dirinya terhadap alam, yaitu dengan bekerja sebagai petani dan buruh saja. Oleh karena itu untuk memenuhi

kehidupannya, masyarakat terlalu sibuk dalam mencari nafkah untuk dirinya. Hal itu menyebabkan rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Harapan Makmur, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan sibuknya dalam memperhatikan dalam mencari nafkah mereka.

c). Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur

Pemerintah Desa/Kepenghuluan sebagaimana diatur dalam undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerinatah Desa juga berpedoman kepada ketentuan serta petunjuk pelaksanaan dari Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan pelaksanaan Pemerintahan Harapan Makmur juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 dan segala peraturan dan pedoman pelaksanaan lainnya.

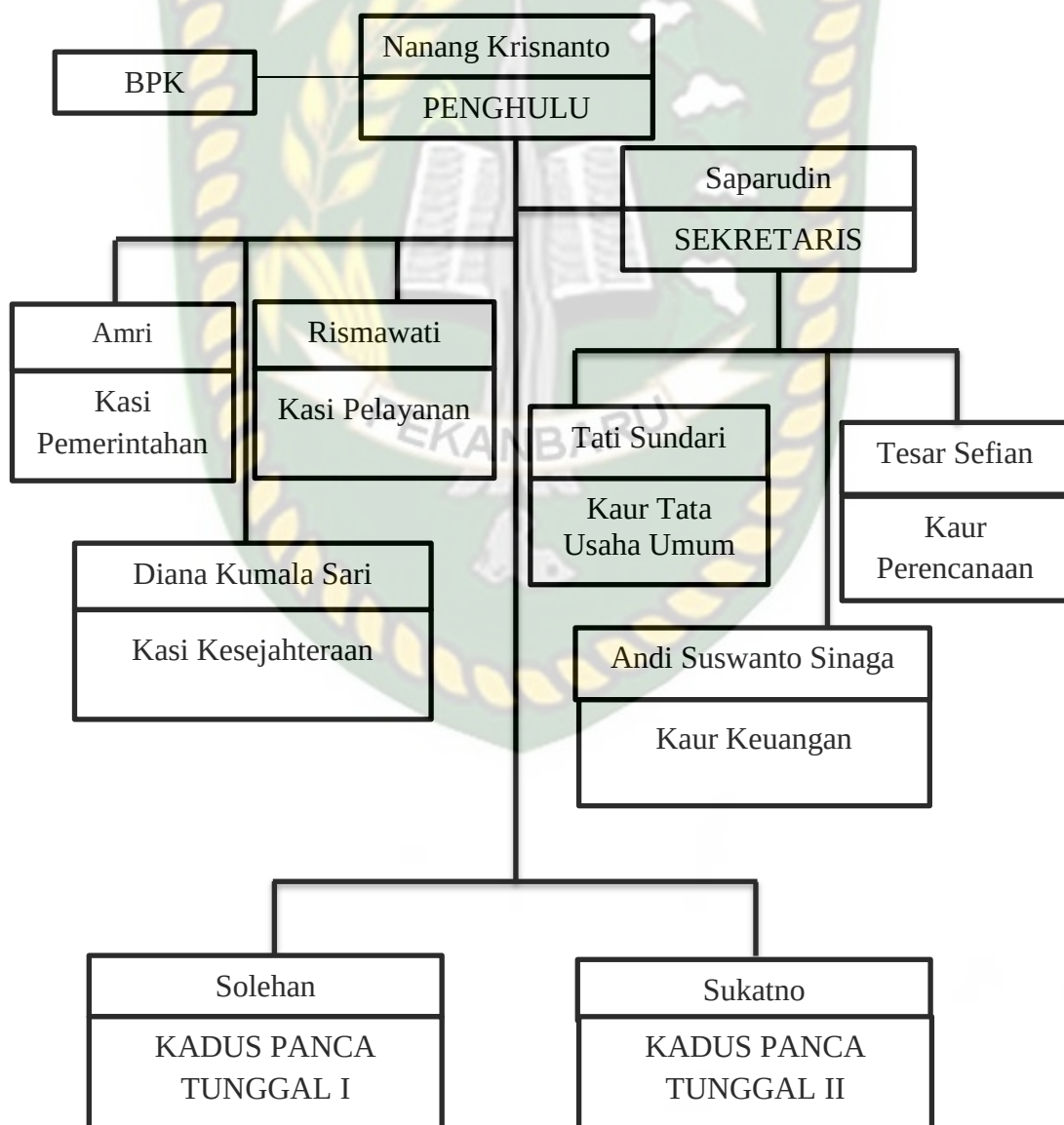
Pemerintah Kepenghuluan Harapan Makmur Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam menyiapkan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, dibantu oleh Penghulu dan beberapa perangkat Kepenghuluan lainnya. Berikut susunan dari Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur:

1. Penghulu
2. Sekretaris
3. Kaur Tata Usaha Umum
4. Kaur Keuangan
5. Kaur Perencanaan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Kesejahteraan
8. Kasi Pelayanan
9. Kadus Panca Tunggal

10. Kadus Panca Tunggal II

Untuk lebih jelasnya adapun struktur organisasi dan tugas setiap unit kerja yang ada di Kepenghuluan Harapan Makmur dapat dilihat pada bagian dibawah ini:

Gambar IV. 1: Tugas Struktur Organisasi Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir



Sumber data: Kantor Kepenghuluan Harapan Makmur 2020

Dapat dilihat dari gambar struktur organisasi diatas bahwa BPK dibantu dengan Penghulu adalah orang yang memiliki peran pertama dalam melakukan tanggung jawab terhadap kemajuan desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

Selanjutnya perangkat desa tersebut diatas dibantu oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) berikut gambar struktur organisasi BPD Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir:

Gambar IV. 2: Tugas Struktur Organisasi Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir



Sumber data: RPJM Kepenghuluan Harapan Makmur 2018-2023

Dapat dilihat dari gambar struktur organisasi diatas bahwa Ketua BPD dibantu dengan Wakil Ketua, Sekretariat dan dua Anggotanya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Harapan Makmur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina ekonomi desa.
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa:

1. **Tugas Pokok :** Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. **Fungsi :**
 - a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan (KAUR) Umum:

1. **Tugas Pokok** : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. **Fungsi** :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa.
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan:

1. **Tugas Pokok** : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. **Fungsi** :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
 - b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan:

1. **Tugas Pokok** : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. **Fungsi** :
 - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
 - b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
 - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa.

e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

6. Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK).
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhanpenangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.
4. Surat Keterangan Lalu Lintas.
5. Surat Keterangan NTCR.
6. Surat Pengantar Pernikahan.
7. Surat Keterangan Naik Haji.

8. Surat Keterangan Domisili.
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian.
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati.
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel.
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan.
15. Surat Keterangan Izin Keramaian.
16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu.
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

7. Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan:

1. **Tugas Pokok :** Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan,

pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
- c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

8. Kepala Urusan (KAUR) Kesejahteraan Rakyat (KESRA):

1. **Tugas Pokok :** Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. **Fungsi :**
 - a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

9. Kepala Dusun:

A. Tugas Pokok:

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

B. Fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

10. Badan Perwakilan Desa (BPD):

A. Fungsi:

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

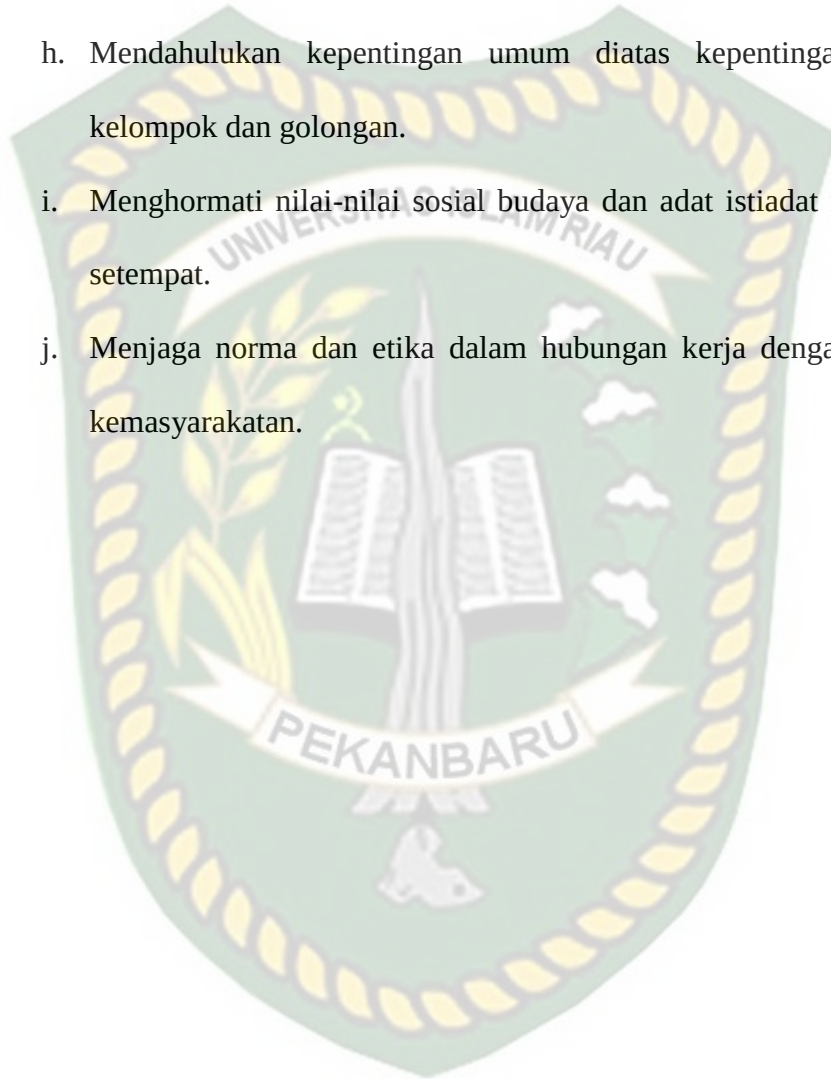
B. Tugas:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

C. Hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat Kewajiban.
- c. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.

- f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g. Memproses pemilihan kepala desa.
- h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang di jadikan objek Penelitian adalah masyarakat, maka sesuai dengan judul dari penelitian ini, yang ditetapkan sebagai responden adalah Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur dan Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur. Dalam proses pembangunan yang ada di Kepenghuluan Harapan Makmur, peran masyarakat sangat diperhitungkan.

Adapun identitas responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Nama Responden
- b. Jenis Kelamin
- c. Umur
- d. Pendidikan Terakhir
- e. Jabatan Responden

1. Jenis Kelamin Responden

a. Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur

Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis kelamin, maka pegawai kantor Kepenghuluan Harapan Makmur di isi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabal berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	7 orang	58 %
2.	Perempuan	5 orang	42 %
	Jumlah	12 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah responden peneliti pada Kantor Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak pegawai laki-laki yaitu sebanyak 7 orang (58%) dari pada pegawai perempuan yang hanya 5 orang (42%).

b. Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur

Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai penampung dan penyuluhan aspirasi dari masyarakat dalam hal pembangunan. Oleh karena itu, sesuai dengan judul peneliti maka responden lembaga kemasyarakatan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	14 orang	20 %
2.	Perempuan	10 orang	80 %
	Jumlah	70 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang telah dipilih untuk menjadi penampung aspirasi masyarakat di Kepenghuluan Harapan Makmur lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 14 orang atau 20% dari pada yang berjenis kelamin perempuan hanya 10 orang atau 80%.

c. Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah lebih banyak masyarakat berjenis kelamin laki-laki dari pada masyarakat berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	37 orang	70%
2.	Perempuan	33 orang	30%
	Jumlah	70 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki jumlahnya tidak begitu jauh lebih banyak yaitu 37 orang atau 70% dibanding masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 33 orang atau 30%. Dalam pembangunan fisik, memang yang diperlukan adalah kekuatan

dari tubuh, oleh karena itu lebih banyak dibutuhkan tenaga dari masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki. Terlepas semua itu, masyarakat berjenis kelamin perempuan juga sangat dibutuhkan dalam dalam proses pembangunan fisik. Partisipasi yang dapat diberikan oleh perempuan dapat berupa pemikiran (ide-ide), uang dan partisipasi lainnya.

Dalam pembangunan fisik di pedesaan, jenis kelamin juga sangat mempengaruhi pada tingkat partisipasi. Nilai yang cukup dominan dalam kalangan masyarakat pedesaan adalah yang masih menganggap perempuan tempatnya hanya didapur, yang berarti bahwa perempuan tugasnya hanya mengurus rumah tangganya saja, oleh karena itu dalam hal partisipasi dengan bertujuan meningkatkan kemajuan suatu pedesaan masih kurang. Dampaknya adalah masyarakat yang berada di wilayah pedesaan tingkat partisipasi perempuan masih sangat kurang.

2. Usia/Umur Responden

a. Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur

Usia adalah salah satu yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Kepenghuluan Harapan Makmur apalagi dikalangan Pemerintahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	20-30 tahun	4 orang	33 %
2.	31-40 tahun	2 orang	17 %
3.	41-60 tahun	6 orang	50 %
	Jumlah	12 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa responden Kepenghuluan Harapan Makmur yang berusia 20-30 tahun berjumlah 4 orang atau sekitar 33%, dan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 17%, terakhir yaitu responden yang berusia 41-60 tahun berjumlah 6 orang atau 50%. Jika dilihat dari segi usia, Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur masih tergolong usia produktif.

b. Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur

Berikut daftar usia Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	20-30 tahun	4 orang	30 %
2.	31-40 tahun	3 orang	15 %
3.	41-60 tahun	7 orang	55 %
	Jumlah	24 orang	100 %

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Karena Lembaga Kemasyarakatan mempunyai salah satu fungsi yaitu bisa membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, maka usia dari pegawainya juga berpengaruh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dari tabel diatas terlihat bahwa Responden Lembaga Kemasyarakatan yang usia 20-30 tahun sebanyak 4 orang atau 30%, yang berusia 31-40 tahun ada 3 orang atau 15%, dan responden berumur 41-60 sebanyak 7 orang atau 55%.

c. Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur

Usia Responden Masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	20-30 tahun	5 orang	10 %
2.	31-40 tahun	21 orang	30 %
3.	41-60 tahun	44 orang	60%
	Jumlah	70 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur yang berusia antara 20-30 tahun ada 5 orang atau sekitar 10%, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 21 orang atau 30%, dan yang berusia 41-60 tahun sebanyak 44 orang atau 60%. Jadi jumlah keseluruhan responden masyarakat dalam penelitian ini adalah 70 orang. Dilihat dari usia masyarakat yang masih terbilang produktif dan masih mempunyai tenaga yang dapat lebih membantu dalam proses pembangunan adalah yang berusia sekitar 20-

30 tahun dan 31-40 tahun. Sehingga jika lebih mempunyai partisipasi yang kuat maka akan mempermudah dalam perkembangan sebuah desa tersebut. Tetapi masyarakat yang berusia 41-60 juga tidak bisa diabaikan. Jika tidak dapat membantu dalam bantuan tenaga atau pekerjaan fisik, dapat membantu proses pembangunan dalam mengeluarkan ide-ide atau pemikiran serta bantuan materi yang dapat membantu mempercepat perkembangan desa.

3. Tingkat Pendidikan Formal Responden

a. Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu organisasi, dimana, semakin tingkat pendidikannya tinggi, maka keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang akan lebih tinggi pula.

Tingkat pendidikan responden yang dijadikan sebagai sampel Kepenghuluan Harapan Makmur pada penelitian ini mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

Tabel V.7 : Klasifikasi Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	SMA	12 orang	100%
2.	DIII	-	-
3.	Sarjana	-	-
4.	DII	-	-
	Jumlah	12 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur hanya terisi oleh orang yang tingkat pendidikan formal SMA saja yaitu 12 orang atau 100%. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur cukup rendah. Padahal dibutuhkannya pendidikan yang tinggi karena dapat lebih membantu perkembangan suatu desa dengan cara mengeluarkan ide-ide, pola fikir yang tinggi serta wawasan yang luas yang dapat bermanfaat bagi pembangunan desa.

b. Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur

Tabel V.8 : Klasifikasi Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	SMA	22 orang	80%
2.	DIII	2 orang	20%
3.	Sarjana	-	-
4.	DII	-	-
	Jumlah	24 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Lain halnya dengan Responden Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur dimana pegawainya keseluruhan mempunyai pendidikan formal SMA. Dapat dilihat pada tabel diatas Responden Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Harapan Makmur pegawai yang tamatan SMA sebanyak 22 orang atau 80% dan yang tamatan DIII ada 2 orang atau 20%. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat

partisipasinya dalam pembangunan dan lebih mengetahui akan pentingnya suatu perubahan kedepannya.

c. Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur

Pendidikan sangat berpengaruh dalam tingkat kesadaran diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan lebih sadar dan mengetahui pentingnya partisipasi dalam pembangunan, begitupun sebaliknya, masyarakat yang berpendidikan kurang akan lebih cenderung untuk tidak ikut dan kurang kesadaran untuk berpartisipasi.

Berikut tingkat pendidikan formal Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur:

Tabel V.9 : Klasifikasi Responden Masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	SMA	43 orang	61%
2.	DIII	3 orang	4,28 %
3.	Sarjana	1 orang	1,42 %
4.	DII	23 orang	33,3 %
	Jumlah	70 orang	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2020

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa masyarakat yang tamatan SMA ada 43 orang atau 61%, yang berpendidikan DIII sebanyak 3 orang atau 4,28% dan yang Sarjana hanya 1 orang atau 1,42%. Dan terlihat bahwa dll (dan lain-lain) adalah masyarakat yang tamatan SD, SMP dan yang lainnya sebanyak 23 orang atau 33,3%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kepenghuluan Makmur tingkat

pendidikan formalnya masih kurang. Padahal pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan yang lebih baik. Bagaimana bisa masyarakat mengikuti rapat yang dilaksanakan didesa dapat lebih berpartisipasi mengeluarkan ide-ide jika tidak memiliki wawasan yang luas. Dalam rapat tentunya membutuhkan jawaban-jawaban dari masyarakat terkait pembangunan baik berupa kritik, saran dan semacamnya.

Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) merupakan suatu forum masyarakat untuk perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah nasional yang berkerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Proses yang melibatkan peran serta warga masyarakat ini sering disebut juga pembangunan partisipatif.

Dalam bab ini, sesuai dengan kenyataan yang peneliti peroleh dari hasil pengamatan dan pengumpulan data langsung dari lapangan, maka penulis membagi pembahasan penelitian dalam 4 pembahasan:

- A. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.
- B. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan.
- C. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.
- D. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan.

B. Hasil Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir

Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengumpulan data dari penelitian lapangan yang penulis peroleh dari penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut adalah pembahasan hasil kuisioner untuk Responden pada penelitian ini dalam indikator variabel dan sub item penilaian yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam proses pembangunan tentunya harus di sudahi dengan pengambilan keputusan dari hasil rapat ataupun Musrenbang. Dan dalam memutuskan suatu keputusan tentunya harus sesuai dengan kesepakatan dimana ada Pemerintahan dan ada Masyarakatnya juga.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, keaktifan pemerintahan desa dan masyarakat dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan didesa dimana rapat tersebut berkaitan dengan proses pembangunan fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur.

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan di Kepenghuluan Harapan Makmur

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Total
		B	CB	KB	
1	2	3	4	5	6
1.	Menghadiri rapat desa	46	59	1	106
2.	Tanggapan Pemerintah Desa dan masyarakat desa dari hasil rapat	21	83	2	106
3.	Mengeluarkan ide-ide dalam pembangunan desa	35	70	1	106
4.	Hasil rapat dan ide-ide dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan	37	69	0	106
Jumlah		139	281	4	424
Skor		417	562	4	983
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengenai indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dalam Analisis Partisipasi dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa dari 106 orang yang peneliti pilih sebagai responden.

Pada poin ke pertama tentang *Menghadiri Rapat Desa* peneliti mendapatkan jawaban kategori Baik ada 46 orang responden dengan alasan banyak dari

masyarakat yang peduli mengikuti undangan rapat yang diselenggarakan di Desa. Dan untuk 59 orang responden yang menjawab Cukup Baik, alasan terkadang undangan rapat ataupun informasi tidak sampai kepada masyarakat, dan selanjutnya ada 1 orang responden dengan alasan dalam rapat ditentukan ketika jam kerja masyarakat atau tidak diatur sesuai jadwal yang baik

Pada poin kedua mengenai *Tanggapan Pemerintah Desa dan Masyarakat desa dari hasil rapat* untuk kategori Baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 21 orang responden dengan alasan ide-ide yang diusulkan antara Pemerintah dan Masyarakat banyak yang dilaksanakan. Dan mendapatkan 83 orang responden untuk kategori Cukup Baik dengan alasan hanya sebagian usulan kegiatan dari masyarakat yang diterima lebih banyak usulan sesuai kebutuhan sebagian orang. Dan Sedangkan untuk kategori Kurang Baik peneliti mendapatkan jawaban 2 orang responden dengan alasan mereka menganggap usulan dari masyarakat jarang didengarkan.

Kemudian untuk poin ke tiga tentang *Mengeluarkan ide-ide dalam pembangunan desa* mendapatkan 35 orang responden yang menjawab Baik, kemudian 70 orang yang menjawab Cukup Baik dengan alasan dalam rapat sebagian masyarakat banyak yang berpartisipasi dalam mengeluarkan ide-ide, dan 1 orang responden yang menjawab Kurang Baik dengan alasan tidak adanya diberikan ruang untuk masyarakat mengeluarkan ide.

Dan selanjutnya poin ke empat tentang *Hasil rapat dan ide-ide dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan*, yang menjawab Baik terdapat ada

37 orang responden dengan alasan hasil dari ide-ide yang ikut dikeluarkan oleh masyarakat untuk proses pembangunan dilaksanakan dengan baik, dan 69 orang responden yang menjawab Cukup Baik dan dengan alasan terkadang semua ide masyarakat sebagian dilaksanakan dan dipilih yang benar-benar kebutuhan masyarakat dan untuk yang menjawab Kurang Baik tidak ada responden yang memberi jawaban.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)** mengenai indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dengan pertanyaan pertama Bagaimana menurut Bapak, apakah sangat penting keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa? beliau menjawab:

“Jika ditanya penting atau tidak, pastinya penting. Dikarenakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa ini pasti untuk kebutuhan bersama. Mulai dari merencanakan sampai memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan pasti harus ada suara dari masyarakat juga. Sayangnya, masyarakat lebih banyak memilih untuk tidak banyak bersuara, dan hanya menyerahkan proses pembangunan kepada Pemerintahan setempat.”(Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan **(Bapak Saparudin Selaku Sekretaris Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, berikut jawaban beliau:

“Dapat dikatakan cukup penting dan bisa juga sangat penting. Tetapi dalam hal ini juga tidak dapat memaksa masyarakat untuk selalu menghadiri rapat didesa, jadi ketika rapat hanya yang punya keinginan saja yang hadir dan yang memenuhi undangan rapat”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan **(Bapak Tesar Sefian Selaku Kasi Perencanaan Kepenghuluan Harapan Makmur)**, dengan pertanyaan yang sama, jawaban beliau adalah:

”Jika mengadakan rapat di desa ini apalagi Musrenbang, pasti ada undangan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat disini banyak yang mengacuhkan undangan tersebut dengan alasan mempunyai kesibukan lain. Jadi sebenarnya cukup penting kehadiran masyarakat dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh desa dengan tujuan agar sama-sama menyepakati apa saja yang diputuskan dalam rapat tersebut, dan mengetahui respon masyarakat lainnya”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara untuk pertanyaan kedua dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)** mengenai indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Bagaimana menurut Bapak, apakah dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan didesa masyarakat berperan aktif? beliau menjawab:

”Dalam rapat, yang banyak mengeluarkan usulan atau ide memang dari pihak pemerintahan desa, tetapi terkadang jika tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ada juga yang mengusulkan ide-ide lainnya atau melakukan penyanggahan”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan (**Bapak Saparudin Selaku Sekretaris Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur**), beliau menjawab:

“Terkadang aktif jika ada yang ingin disampaikan, tetapi terkadang tidak ada bersuara juga. Jadi tergantung masyarakatnya, jika mereka mempunyai ide atau usulan lain, ataupun memberi tambahan dari usulan yang ingin diputuskan mereka pasti aktif dalam rapat itu” (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan terakhir pada Indikator Pengembalian Keputusan, peneliti wawancara kembali dengan (**Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur**), Bagaimana menurut Bapak, apakah masyarakat aktif dalam rapat yang dilaksanakan di desa? Berikut jawaban beliau:

“Jika dibilang aktif, ya masih ada masyarakat yang aktif tetapi dalam hitungan kecil, hanya sebagian saja yang memang meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan yang berikan oleh desa”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, dan hasil wawancara dengan Penghulu, Sekretaris Penghulu dan Kasi Perencanaan Kepenghuluan Harapan Makmur, dapat disimpulkan bahwa indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan jumlah skor **983**.

Berikut adalah data sekunder dari Indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:

Tabel V.11 :Daftar Rapat Hari Rabu 26 Oktober 2020 Partisipasi Masyarakat dalam Menampung Usulan/Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan.

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Drs. H.M Yusuf, M.Si	Sekcam BASIRA	Darussalam
2.	Nanang Krisnanto	Penghulu	H. Makmur
3.	Saparudin	Sekretaris	H. Makmur
4.	Amri	Kasi Pemerintahan	H. Makmur
5.	Diana Kumala Sari	Kasi Kesejahteraan	H. Makmur
6.	Rismawati	Kasi Pelayanan	H. Makmur
7.	Tatik Sundari	Kaur Tata Usaha/Umum	H. Makmur
8.	Andi Suswanto Sinaga	Kaur Keuangan	H. Makmur
9.	Tesar Sefian	Kaur Perencanaan	H. Makmur
10.	Dewi Ratna Sari	Tenaga Teknis Adm	H. Makmur
11.	Yunita	Tenaga OP Komputer	H. Makmur
12.	Ariska Sri Rahayu	Tenaga Pembantu Bendahara	H. Makmur
13.	Samsu	Masyarakat	H. Makmur
14.	Solehan	Kadus Panca Tunggal I	H. Makmur
15.	Sukatno	Kadus Panca Tunggal II	H. Makmur
16.	Turyanto	Wakil Ketua LPM	H. Makmur
17.	Saputra Aritonang	Ketua RW 001 DSN PT I	H. Makmur
18.	Saepudin	Ketua RW 002 DSN PT I	H. Makmur
19.	Sakri	Ketua RW 001 DSN PT II	H. Makmur
20.	Nurdianto	Ketua RW 002 DSN PT II	H. Makmur
21.	Abdul Rahman	Ketua RT 001 DSN PT I	H. Makmur
22.	Supri	Masyarakat	H. Makmur
23.	Maruf	Masyarakat	H. Makmur
24.	Erwin	Masyarakat	H. Makmur
25.	Darmono	Tokoh Masyarakat	H. Makmur
26.	Deni	Ketua Karang Taruna	H. Makmur
27.	Ajiz	Masyarakat	H. Makmur
28.	Pairin	Masyarakat	H. Makmur
29.	Tukirin	Masyarakat	H. Makmur
30.	Andre	Masyarakat	H. Makmur
31.	Sukri	Masyarakat	H. Makmur
32.	Ido	Masyarakat	H. Makmur
33.	Nainggolan	Masyarakat	H. Makmur
34.	Monang	Masyarakat	H. Makmur
35.	Pandi	Masyarakat	H. Makmur

Sumber data: Laporan pertanggungjawaban Kasi Pemerintahan , 2019

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan adalah masih kurangnya atau hanya sebagian kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan baik dalam hal mengikuti rapat desa ataupun mengeluarkan usulan-usulan dan ide-ide untuk meningkatkan pembangunan sesuai apa yang masyarakat butuhkan.

Dalam indikator ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kepenghuluan Harapan Makmur dalam pengambilan keputusan sudah ada, namun belum maksimal. Masyarakat yang menghadiri rapat hanya sebagian kecil saja, dan dalam mengusulkan usulan untuk pembangunan dari hasil wawancara bahwa masyarakat yang hadir juga kurang membuka diri untuk mengusulkan pembangunan yang mereka inginkan. Namun, usulan dari masyarakat ditampung oleh pemerintah Kepenghuluan Harapan Makmur.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Setelah pengambilan keputusan pembangunan fisik desa dirumuskan, tindakan selanjutnya adalah merealisasikan rencana tersebut. Pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintahan dan masyarakat setempat. Meskipun ada bantuan dana dari pemerintah tidak dapat memenuhi sepenuhnya dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Oleh karena itu swadaya masyarakat sangat diperlukan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan didesa, peran aktif masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa uang/dana, sumbangn tenaga, dan sumbangan berupa material akan mencapai hasil yang baik.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan terhadap pembangunan fisik desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kepenghuluan Harapan Makmur

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Total
		B	CB	KB	
1	2	3	4	5	6
1.	Ikut serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung	44	60	2	106
2.	Partisipasi masyarakat dalam bergotong royong mempercepat proses pembangunan	47	59	0	106
3.	Membantu dengan bantuan materi dana atau bentuk material untuk melancarkan pembangunan desa	38	64	4	106
4.	Bantuan dana dari masyarakat sangat dibutuhkan atau cukup dengan bantuan dana dari pemerintah	40	64	2	106
Jumlah		169	247	8	424
Skor		507	494	8	1009
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa mengenai indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan dalam Analisis Partisipasi dalam Pembangunan Fisik di

Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa dari 106 orang yang peneliti pilih sebagai responden.

Pada poin ke pertama tentang *Ikut serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung* peneliti mendapatkan jawaban kategori Baik ada 44 orang responden dengan alasan terkadang banyak juga masyarakat yang peka akan bergotong royong. Dan untuk 60 orang responden yang menjawab Cukup Baik, dan selanjutnya ada 2 orang responden dengan alasan pekerja yang disediakan pemerintah Kepenghuluan Harapan Makmur sudah sangat membantu proses pembangunan sehingga masyarakat tidak perlu berperan juga.

Pada poin kedua mengenai *Partisipasi masyarakat dalam bergotong royong mempercepat proses pembangunan* untuk kategori Baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 47 orang responden dengan alasan sangat betul sekali bahwasannya jika masyarakat ikut serta dalam bergotong royong tentu pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung akan cepat selesai. Dan mendapatkan 59 orang responden untuk kategori Cukup Baik. Dan Sedangkan untuk kategori Kurang Baik peneliti mendapatkan tidak ada responden yang menjawab kategori Kurang Baik.

Kemudian untuk poin ke tiga tentang *Membantu dengan bantuan materi dana atau bentuk material untuk melancarkan pembangunan desa* mendapatkan 38 orang responden yang menjawab Baik, kemudian 64 orang yang menjawab

Cukup Baik dengan alasan jika masyarakat di Kepenghuluan Harapan Makmur masih mau ikut menyumbangkan dana untuk pembangunan apalagi pembangunan masjid atau yang memang sangat diperlukan masyarakat, dan 4 orang responden yang menjawab Kurang Baik dengan alasan tidak perlu lagi dari masyarakat dikarenakan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk desa sudah sangat membantu.

Dan selanjutnya poin ke empat tentang *Bantuan dana dari masyarakat sangat dibutuhkan atau cukup dengan bantuan dana dari pemerintah*, yang menjawab Baik terdapat ada 40 orang responden,, dan 64 orang responden yang menjawab Cukup Baik, untuk yang menjawab Kurang Baik ada 2 responden yang menjawab.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)** mengenai indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan dengan pertanyaan pertama Apakah menurut Bapak, masyarakat banyak yang membantu dalam memberikan sumbangan tenaga untuk mempercepat proses pembangunan di desa? beliau menjawab:

“ Kalau kepada masyarakat kami sebagai pemerintahan desa berharap lebih kepada masyarakat untuk ikut andil kelapangan untuk bergotong royong, selain mempercepat juga bisa menghemat dana dan dapat melakukan pelaksanaan pembangunan yang lain.. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan **(Bapak Saparudin Selaku Sekretaris Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, berikut jawaban beliau:

“Ya, jelas mempercepat proses pembangunan yang diselenggarakan, apalagi jika banyak yang ikut serta dalam bergotong royong. Hanya saja yang disayangkan, masyarakat masih sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga yang ikut dalam bergotong royong hanya hitungan kecil saja. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Selanjutnya dengan pertanyaan kedua, peneliti melakukan wawancara dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, pertanyaannya yaitu: Bagaimana menurut pendapat Bapak, seberapa banyak masyarakat yang berpartisipasi berupa sumbangan dana untuk desa?. Jawaban beliau adalah:

“Jika ditanya sumbangan dana, tentu sedikit. Karena mungkin anggapan masyarakat disini dana yang keluar dari pemerintah untuk desa sangat membantu pelaksanaan kegiatan didesa ini, padahal kalau saja masyarakat banyak yang menyumbangkan dananya, akan lebih mempercepat ataupun akan lebih menjadikan desa ini cepat berkembang. Tapi persoalan dana, kami pun tidak dapat memaksakan masyarakat. Jika ada yang menyumbangkan ya kami terima, jika tidak ya tidak apa-apa”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan **(Bapak Saparudin Selaku Sekretaris Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, berikut jawaban beliau:

“Masyarakat disini tidak begitu banyak untuk menyumbangkan dananya dalam pembangunan fisik. Mungkin ya beberapa ada. Tetapi jika pembangunan untuk Masjid, masyarakat lebih banyak dalam memberikan sumbangannya. Mungkin jika untuk pembangunan yang lain karena sudah ada anggaran tersendiri jadi masyarakat lebih memilih untuk tidak berpartisipasi”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan indikator Pelaksanaan Kegiatan ini, pertanyaan terakhir peneliti wawancara kembali dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, Bagaimana menurut Bapak, tentang masyarakat dalam memberikan sumbangan material untuk pelaksanaan pembangunan yang sudah ada di desa?. Jawaban beliau adalah:

“Ya, sama seperti sumbangan dana tadi, apalagi sumbangan material ini justru semakin memiliki harga tinggi, intinya Pemerintahan desa tidak memaksa masyarakat, hanya berharap kepekaan masyarakat saja. Tetapi bantuan material sebagian masyarakat ada yang ikut memberi untuk sumbangan pembangunan Masjid ataupun Mushollah-Mushollah per RT nya”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dapat dilihat berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, dan hasil wawancara dengan Penghulu, Sekretaris Penghulu Kepenghuluan Harapan

Makmur, dapat disimpulkan bahwa indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan jumlah skor **1009**.

Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada data sekunder pada indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan yang penulis dapatkan melalui observasi dilapangan berikut:

Tabel V.13: Target dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir 2018

No	Jenis Pembangunan Fisik Desa	Volume	Target Biaya (Rp)	Bantuan Pemerintah (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (pos kamling)	2 Unit	43.426.000	30.000.000	13.426.000
2.	Pembangunan Drainase Jl. Sultan Syarif Kasim Kelompok VIII Tahap I	220mx0,5mx0,5 m	95.392.500	90.000.000	5.392.500
3.	Pembangunan Drainase Jl. Datuk Pusako Kelompok V Tahap I	230mx0,5mx0,5 m	99.745.000	90.000.000	9.745.000

No	Jenis Pembangunan Fisik Desa	Volume	Target Biaya (Rp)	Bantuan Pemerintah (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)
4.	Pembangunan Drainase Jl. Pendidikan Kelompok IV	128mx0,5mx0,5 m	56.624.500	50.000.000	6.624.500
	Jumlah		295.188.000	260.000.000	35.188.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kaur Keuangan, 2018

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan adalah hanya sebagian masyarakat yang memiliki kepekaan untuk ikut dalam berpartisipasi berupa gotong royong, sumbangan dana, ataupun material, sebagian masyarakat hanya melepaskan semua kepada Pemerintahan di Kepenghuluan Harapan Makmur.

Dalam indikator ini dan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya dalam bergotong royong untuk membantu pembangunan yang sedang terlaksana di Kepenghuluan Harapan Makmur masyarakat yang ikut andil mengeluarkan tenaganya tidaklah terhitung besar, hanya sebagian kecil saja, mungkin karena bagi mereka membantu dengan tidak memperoleh penghasilan tidaklah menguntungkan. Memang, membantu dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses pembangunan yang ada, namun sebagian besar masyarakat menganggap jika tidak

berpenghasilan, lebih baik mereka mengerjakan dan mementingkan urusan mereka masing-masing demi kehidupan mereka tetap berlangsung. Dan dalam menyumbangkan materi, bagi masyarakat bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sudah cukup untuk mengerjakan pembangunan yang sedang berlangsung, oleh karena itu masyarakat yang ikut andil dalam menyumbangkan materi sangat sedikit.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Setelah dilakukan Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Kegiatan, selanjutnya dilakukan Partisipasi masyarakat dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan ini, bertujuan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembangunan kedepannya.

Untuk mengetahui jelas bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi dari hasil pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14 : Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan di Kepenghuluan Harapan Makmur

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Total
		B	CB	KB	
1	2	3	4	5	6
1.	Memberi dalam melihat perkembangan pembangunan dan memberi masukan	50	54	2	106

1	2	3	4	5	6
2.	Respon dari masukan yang berasal dari masyarakat	41	65	0	106
3.	Keterlibatan dalam menanggapi sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat setempat	29	74	3	106
4.	Kepuasan masyarakat dalam merespon pembangunan yang telah ada, sesuai tidaknya dengan apa yang diharapkan	32	74	0	106
Jumlah		152	267	5	424
Skor		456	534	5	995
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengenai indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan pada Analisis Partisipasi dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa dari 106 orang yang peneliti pilih sebagai responden.

Pada poin ke pertama tentang *Memberi dalam melihat perkembangan pembangunan dan memberi masukan* peneliti mendapatkan jawaban kategori Baik ada 50 orang responden. Dan untuk 54 orang responden yang menjawab Cukup Baik, alasan jika masyarakat melihat hasil pembangunan tidak sesuai yang diharapkan terkadang juga memberikan masukan pada pembangunan yang sedang

diselenggarakan, dan selanjutnya ada 2 orang responden yang menjawab kurang baik.

Pada poin kedua mengenai *Respon dari masukan yang berasal dari masyarakat* untuk kategori Baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 41 orang responden. Dan mendapatkan 65 orang responden untuk kategori Cukup Baik. Dan Sedangkan untuk kategori Kurang Baik peneliti tidak mendapatkan responden yang menjawab.

Kemudian untuk poin ke tiga tentang *Keterlibatan dalam menanggapi sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat setempat* mendapatkan 29 orang responden yang menjawab Baik, kemudian 74 orang yang menjawab Cukup Baik dengan alasan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kemauan masyarakat saat diselenggarakannya rapat, dan 3 orang responden yang menjawab Kurang Baik dengan alasan pembangunan yang sudah ada hanya kepentingan sebagian orang saja.

Dan selanjutnya poin ke empat tentang *Kepuasan masyarakat dalam merespon pembangunan yang telah ada, sesuai tidaknya dengan apa yang diharapkan*, yang menjawab Baik terdapat ada 32 orang responden, dan 74 orang responden yang menjawab Cukup Baik dan untuk yang menjawab Kurang Baik tidak ada responden yang memberi jawaban.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)** mengenai indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dengan

pertanyaan pertama Bagaimana menurut Bapak, tentang tanggapan masyarakat dalam menanggapi hasil pembangunan yang sudah ada di desa? beliau menjawab:

“Dalam menanggapi hasil pembangunan yang ada, apalagi memberi saran, kebanyakan pihak pemerintah desa mendengar dari mulut ke mulut bahwasannya pembangunan yang sudah ada tidak sesuai yang diharapkan. Jarang sekali kami mendengar langsung keluhan masyarakat, padahal jika rapat ada dibuka forum untuk perwakilan dari masyarakat yang di persilahkan berbicara”(Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, dan hasil wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur, dapat disimpulkan bahwa indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan jumlah skor **995**.

Berikut ini adalah data sekunder dari Indikator Penelitian Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan yaitu pembangunan yang telah terlaksanakan:

Tabel V. 15 : Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Terlaksana Tahun 2018

No	Pembangunan	Jumlah	Bantuan Dana	Sumber Dana
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	1 Unit	43.426.000	Silpa Dana Desa 2017
2.	Drainase Jl. Sultan Syarif Kasyim Klp. 8 Tahap 1	1 Unit	95.392.500	Dana Desa
3.	Drainase Jl. Datuk Pusako Klp. 5 Tahap 1	1 Unit	99.745.000	Dana Desa
4.	Drainase Jl. Pendidikan	1 Unit	56.624.500	Dana Desa

	Klp. 4			
--	--------	--	--	--

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKP-Kep) Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa hanya sedikit pembangunan yang terlaksana pada tahun 2018. Selain kekurangan biaya, partisipasi masyarakat seharusnya lebih mempermudah dan menghemat biaya dalam pembangunan dan dapat menghasilkan pembangunan yang ingin dicapai lebih banyak lagi. Evaluasi didalam RKP-Kep 2019 tersebut disebutkan bahwa masih terdapat 4 kegiatan pembangunan bidang infrastruktur yang belum dapat dilaksanakan karena kekurangan biaya dan akan diprioritaskan pada tahun mendatang.

Dalam indikator partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan ini Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat tidak lah begitu memperdulikan hasil yang telah ada, masyarakat selalu menerima dan beranggapan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi ada juga sebagian yang merasa tidak sesuai, namun dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat yang merasa tidak sesuai tidak lah memberikan tanggapannya kepada pemerintah Kepenghuluan Harapan Makmur secara langsung, padahal bisa diusulkan melalui rapat dan sebagainya, tetapi masyarakat hanya mengungkapkan kepada sesame masyarakat atau hanya mulut kemulut saja, oleh karena itu sebagian masyarakat masih banyak yang merasa tidak puas dengan pembanguna yang telah dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemanfaatan hasil pembangunan sangat dilupakan oleh masyarakat. Padahal tujuan dari dilaksanakannya pembangunan agar masyarakat dapat

memanfaatkannya dengan baik dan bertujuan memperbaiki mutu masyarakat. Partisipasi dalam Pemanfaatan hasil pembangunan ini juga dapat lebih merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi kedepannya.

Setelah partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, maka partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam merawat, memelihara dan menjaga hasil pembangunan tersebut agar hasil pembangunan yang ada dapat digunakan setiap saat dan berlangsung lama.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.16 : Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Penelitian Terhadap Indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Total
		B	CB	KB	
1	2	3	4	5	6
1.	Menikmati dari hasil pembangunan yang ada	38	67	1	106
2.	Manfaat hasil pembangunan bagi masyarakat	36	70	0	106
3.	Merawat hasil pembangunan	28	70	8	106
4.	Kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya	27	75	4	106

1	2	3	4	5	6
Jumlah		129	282	13	424
Skor		387	564	13	964
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengenai indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan hasil pembangunan dalam Analisis Partisipasi dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa dari 106 orang yang peneliti pilih sebagai responden.

Pada poin ke pertama tentang *Menikmati dari hasil pembangunan yang ada* peneliti mendapatkan jawaban kategori Baik ada 38 orang responden dengan alasan masyarakat sangat menikmati hasil pembangunan yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan untuk 67 orang responden yang menjawab Cukup Baik, dan selanjutnya ada 1 orang responden.

Pada poin kedua mengenai *Manfaat hasil pembangunan bagi masyarakat untuk* kategori Baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 36 orang responden. Dan mendapatkan 70 orang responden untuk kategori Cukup Baik. Dan Sedangkan untuk kategori Kurang Baik tidak ada responden yang menjawab.

Kemudian untuk poin ke tiga tentang *Merawat Hasil Pembangunan* mendapatkan 28 orang responden yang menjawab Baik, kemudian 70 orang yang menjawab Cukup Baik dengan alasan kepedulian dalam merawat hasil

pembangunan sangat diperlukan, dan 8 orang responden yang menjawab Kurang Baik dengan alasan masyarakat hanya menikmati saja, kepekaan untuk merawat hanya sebagian kecil.

Dan selanjutnya poin ke empat tentang *Kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya*, yang menjawab Baik terdapat ada 27 orang responden, dan 75 orang responden yang menjawab Cukup Baik dan untuk yang menjawab Kurang Baik ada 4 responden.

Hasil wawancara dengan **(Bapak Saparudin Selaku Sekretaris Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, terkait indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan pada pertanyaan pertama, Apakah menurut Bapak, masyarakat sudah baik dalam memanfaatkan pembangunan yang sudah ada di desa? berikut jawaban beliau:

“Kalau memanfaatkan sudah baik, masyarakat juga terlihat puas dengan pembangunan yang ada, tetapi sebagian terkadang masih ada yang memberi masukan bahwa pembangunan masih banyak kekurangannya”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan **(Bapak Tesar Sefian Selaku Kasi Perencanaan Kepenghuluan Harapan Makmur)**, dengan pertanyaan yang sama, jawaban beliau adalah:

”Sudah cukup baik, seperti pembangunan jalan di beberapa jalur, kan sudah dilakukan pengaspalan jalan, disana masyarakat jadi lebih mudah untuk

melakukan perjalanan dari jalur yang satu ke yang lain”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara untuk pertanyaan kedua dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)** mengenai indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan, Bagaimana menurut Bapak tentang masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan yang sudah ada di desa? beliau menjawab:

”sangat menikmati tentunya. Kan sudah ada dibuat perencanaan dan didahulukan sesuai dengan kepentingan masyarakat, jadi selesai pembangunannya masyarakat pun senang dan sangat menikmati”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan Ketiga pada Indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan, peneliti wawancara kembali dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, Bagaimana Menurut Pendapat Bapak tentang kepedulian masyarakat dalam merawat/menjaga pembangunan yang sudah ada di desa? Berikut jawaban beliau:

”Jika ditanya untuk merawat, ya memang masih kurang kesadaran masyarakat untuk merawat pembangunan yang ada. Kan seperti diketahui bahwa pembangunan dilakukan pasti sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan pembangunan selesai masyarakat tinggal menikmatinya dan tanpa kesadaran untuk merawat, tapi ada juga yang sadar, hanya sebagian kecil saja”. (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Dengan Pertanyaan terakhir pada Indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan, peneliti wawancara kembali dengan **(Bapak Nanang Krisnanto, selaku Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur)**, Bagaimana Menurut tanggapan Bapak, apakah proses pembangunan Desa sudah dilakukan secara transparan dalam arti tidak ada yang ditutup tutupi didepan masyarakat desa? Berikut jawaban beliau:

”Ya, transparan. Karena dari awal ketika rapat kita mengundang masyarakat, dan keputusan masalah pembangunan apa saja yang dilakukan pun masyarakat mengetahui, sampai pembangunan itu dilaksanakan, semua juga di buat di sosial media Kepenghuluan Harapan Makmur jika ingin melihat perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan atau yang sudah ada. Jika masyarakat yang tidak dapat melihat melalui itu, dapat mendatangi kantor kepala desa ini, dan bertanya apa yang ingin dipertanyakan, pasti akan diberikan jawaban yang transparan.” (Wawancara, Selasa 19 Oktober 2020).

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, dan hasil wawancara dengan Penghulu, Sekretaris Penghulu dan Kasi Perencanaan Kepenghuluan Harapan Makmur, dapat disimpulkan bahwa indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan jumlah skor **964**.

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan adalah bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat pembangunan yang sudah ada.

Setelah pembangunan selesai, masyarakat hanya menikmati hasilnya tetapi hanya sebagian kecil yang mau ikut membantu dalam merawat pembangunan tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluhan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Partisipasi Masyarakat Mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluhan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Skor	Kategori
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik		
1	2	3	4	5	6	7
1	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	139	281	4	983	Cukup Baik
2	Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan	169	247	8	1009	Cukup Baik
1	2	3	4	5	6	7
3	Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	152	267	5	995	Cukup Baik
4	Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan	129	282	13	964	Cukup Baik
Jumlah		3.951				
Skor		987,75				
Kategori		Cukup Baik				

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel V.14 diatas dapat diketahui bahwa diketahui rekapitulasi jawaban responden mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dengan 4 (Empat) indikator yang digunakan yaitu:

Pada indikator pertama Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan berjumlah 139 yang menyatakan Baik, 281 yang menyatakan Cukup Baik, dan 4 yang menyatakan tingkat Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Kurang Baik. Indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan mempunyai skor 983 dan dalam kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari dilakukannya rapat dan mengundang pihak-pihak yang terlibat khususnya masyarakat tetapi masih ada yang kurang puas atas hasil yang sudah diputuskan, disebabkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat itu sudah diundang tetapi tidak seluruhnya hadir.

Selanjutnya pada indikator kedua Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan berjumlah 169 yang menyatakan Baik, 247 yang menyatakan Cukup Baik, dan 8 yang menyatakan tingkat Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Kurang Baik. Indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan ini mempunyai skor 1009 dan dalam kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat bahwa masyarakat hanya sebagian kecil yang mengerti betapa pentingnya bergotong royong, memberikan partisipasi berupa dana, ataupun tenaga untuk mempercepat proses pembangunan. Sebagian besar hanya mengandalkan dari pemerintahan desa, tanpa mengerti kesadaran diri dalam terlibat partisipasi sangat penting.

Selanjutnya Indikator ketiga yaitu Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan, dimana diperoleh berjumlah 152 yang menyatakan Baik, 267 yang menyatakan Cukup Baik, dan hanya 5 yang menyatakan Kurang Baik. Pada indikator Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ini memperoleh hasil skor 995 dan dalam kategori Cukup Baik.

Pada indikator terakhir atau ke empat yaitu Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan. Dalam indikator ini yang menyatakan Baik berjumlah 129, yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 282 orang dan yang menyatakan Kurang Baik ada 13 orang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sudah cukup baik dalam keadaan pelaksanaan partisipasinya. Sangat diperlukan bantuan dari masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk memperhatikan, mengawasi serta merawat hasil pembangunan.

Masih ada pembangunan yang belum terlaksana dalam program pembangunan fisik desa yang merupakan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa dan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat memperhatikan kegiatan pembangunan. Maka dari itu disinilah peran dari masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut.

Dapat disimpulkan sesuai hasil wawancara dengan Bapak Penghulu, Bapak Sekretaris Kepenghuluan Harapan Makmur, dan Bapak Kasi Pemerintahan

Kepenghuluan Harapan Makmur menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, dalam Pelaksanaan Kegiatan, Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan serta dalam Pemanfaatan hasil pembangunannya dapat dikatakan Cukup Baik. Hanya saja masyarakat harus lebih sadar bahwa dilakukannya pembangunan guna untuk perkembangan desa tersebut, memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, bahkan pendidikan dan berbagai kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi/pengamatan peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan hasil dari ide atau wawasannya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan dikoordinir pemerintahan desa pada umumnya keikutsertaan masyarakat atas sukarela.

Hasil pengamatan Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi sumbangan berupa dana dari masyarakat cukup baik meskipun hanya bagian kecil masyarakat yang peka pentingnya menyumbangkan berupa dana walaupun hitungan kecil untuk membantu proses pembangunan. Begitu pula halnya dengan partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan fisik, dengan kesadaran bahwa pembangunan yang telah diwujudkan adalah aspirasi masyarakat yang berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus lebih mendukung aturan ataupun pengarahan demi memelihara kelestarian pembangunan fisik yang sudah ada.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Menurut hasil pengamatan peneliti dilapangan, bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur masih belum maksimal. Salah satunya terlihat pada Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, dimana diselenggarakan rapat guna membuka forum untuk diskusi bersama serta menerima usulan berupa ide-ide dari masyarakat, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dapat dibuktikan dari ketika diundang dalam mengikuti rapat, sering sekali masyarakat tidak hadir dalam rapat tersebut, oleh karena itu tidak ada suara yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Kepenghuluan Harapan Makmur tersebut.
2. Untuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur pada Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan dimana masyarakat diharapkan ikut dalam bergotong royong guna mempercepat proses pembangunan serta masyarakat diharapkan ikut mengeluarkan ide mereka juga dikatakan masih kurang maksimal. Kebanyakan dari masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya bergotong royong. Masyarakat di Kepenghuluan Harapan Makmur sebagian besar hanya berharap kepada Pemerintah setempat dan masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing.

3. Kemudian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur terhadap Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan, dimana pembangunan yang sudah ada diterima begitu saja tanpa memberi masukan-masukan kepada pihak Pemerintahan Kepenghuluan Harapan Makmur dan dapat dikatakan masih rendah. Perlu adanya pergerakan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau ikut serta berperan aktif dalam mengevaluasi pembangunan yang ada.
4. Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur terhadap Pemanfaatan Hasil Pembangunan. Disini terbukti bahwa masyarakat memang memanfaatkan pembangunan yang ada, tetapi dalam merawatnya masyarakat masih terbilang tidak begitu peduli. Masyarakat juga masih tidak peduli terhadap apa yang telah disediakan, hanya mengetahui bahwa pembangunan itu kebutuhannya tanpa sadar untuk ikut merawat pembangunan tersebut.
5. Berdasarkan hasil wawancara kepada Penghulu Kepenghuluan Harapan Makmur, Sekretaris Kepenghuluan Harapan Makmur beserta Kasi Pemerintahan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik sudah cukup baik. Dalam indikator yang tersedia dalam penelitian ini, sesuai hasil wawancara membuktikan peran masyarakat sudah cukup baik, tetapi sebagian besar masyarakat yang masih kurang peduli atau tidak sadar pentingnya partisipasi dalam mengikuti proses pembangunan yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Harapan Makmur, peneliti menemukan beberapa saran, diantaranya:

1. Dalam mengatasi masalah-masalah yang disebutkan pada penelitian ini dimana partisipasi masyarakat masih kategori cukup baik, maka diperlukan tindakan-tindakan dari pemerintah Kepenghuluan Harapan Makmur untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan atau arahan yang rutin bagi masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi untuk sama-sama meningkatkan perkembangan desa.
2. Dapat juga dilakukan dengan kepekaan pemerintah desa terhadap masyarakat, dan diharapkan juga untuk lebih bertindak dalam mengatasi setiap pendirian untuk lebih di nilai mengayomi masyarakat.
3. Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti juga memberi saran kepada masyarakat untuk lebih mengeluarkan kreativitasnya atau antusias guna membantu untuk berkembangnya desa tersebut. Dikarenakan untuk menciptakan suatu daerah agar lebih maju sangat dibutuhkan peran aktif dari masyarakat setempat.
4. Dan untuk saran yang terakhir, diharapkan masyarakat dan pemerintah untuk terus menjalin hubungan dengan baik, untuk selalu satu tujuan yang sama demi keberhasilan dalam pembangunan desa, yang nantinya akan dinikmati dan berdampak baik bagi semuanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Davis Keith, New Strom, Jhon W. 2000. *Perilaku dalam Organisasi, Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Hamim, Sufian. 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen (Suatu Ilmu, Teori, Konsep, dan Aplikasi)*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian. 2003. *Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Desa Kelurahan*. Jakarta: Departemen dalam Negeri.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isbandi, Rukmino A. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kartini, Kartono. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Soetrisno. 2000. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Simatupang. 2004. *Membangun Manusia Pembangunan*. Bandung: Rosda Karya.
- Syafie, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1 Cetakan 17. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2018. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Veithzal, Rivai. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Pembangunan Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponogoro University.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli, dan Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi:

- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Badan Penerbit FISIPOL UIR.
- Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan.
- Peraturan Pemerintah dalam Negeri (Permendagri) No 6 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Perangkat Desa.

Peraturan Kepenghuluan Harapan Makmur No 09 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKP-Kep) Tahun 2019.

Peraturan Penghulu Harapan Makmur No. 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan (ABPKep) Tahun Anggaran 2019.

